



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**JURANG ANTARA WACANA DAN PELAKSANAAN  
*COMMUNITY-BASED DEVELOPMENT* SEBAGAI PENDEKATAN TERHADAP  
MASALAH PERMUKIMAN KUMUH**

**SKRIPSI**

**SYAHRU BANU  
0606076015**

**FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN ARSITEKTUR**

**DEPOK  
Desember 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**JURANG ANTARA WACANA DAN PELAKSANAAN  
*COMMUNITY-BASED DEVELOPMENT* SEBAGAI PENDEKATAN  
TERHADAP MASALAH PERMUKIMAN KUMUH**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Arsitektur**

**SYAHRU BANU  
0606076015**

**FAKULTAS TEKNIK  
DEPARTEMEN ARSITEKTUR**

**DEPOK  
Desember 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Syahru Banu**

**NPM : 0606076015**

**Tanda Tangan : .....**

**Tanggal : 22 Desember 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Syahru Banu

NPM : 0606076015

Program Studi : Arsitektur

Judul Skripsi : Jurang antara Wacana dan Pelaksanaan *Community-Based Development* sebagai Pendekatan terhadap Masalah Permukiman Kumuh

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur pada Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Ir. Gunawan Tjahjono M.Arch Ph.D (.....)

Penguji : Ir. Anthony Sihombing MPD Ph.D (.....)

Penguji : Ir. Teguh Utomo Atmoko MURP (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Desember 2010

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Allah SWT, terima kasih Ya Rabb atas kesempatan yang Engkau berikan untuk dapat menikmati masa-masa mencari ilmu di kampus ini.
- Pak Gunawan Tjahjono, terima kasih untuk bimbingan selama mengerjakan skripsi ini, terima kasih juga untuk bacaan-bacaan yang tidak hanya berguna untuk skripsi ini tetapi juga sangat inspiratif bagi saya.
- Ahmad dan *lappynya*, terima kasih atas pinjaman laptop selama berbulan-bulan, serasa hak milik ya, *hehehe*, *nggak kebayang gimana mad kalo lw nggak pinjemin laptop, thank you soooooo much bro.*
- Mami, *my heaven*, ibu yang selalu bisa diajak saling *curhat*, dan selalu ceria, selalu cium-peluk-menggelitik tiap aku pulang kalau *weekend*, *hehehe*. Mama, *hero in my life*, nenek yang selalu jadi ibu untuk siapa saja, terima kasih selalu *ngingetin* aku untuk makan dan *ngomel* jangan begadang, *hehehe*. Kak Amal dan Akram, saudara yang paling aku sayang, *wish we will always stick together no matter what*. Daneen, ponakan cintanya *aunty*, paling *ngangenin* dan bikin senang tiap pulang kuliah.
- Abi, perantara Tuhan untuk menciptakanku, walaupun Abi jauh, tapi aku merasakan dukungan abi, terima kasih atas diskusi, nasehat hebat yang tertanam di kepalaku, dan *guyon-guyon* yang *ngangenin*, *hehehe*.
- Maher, *hubiku, thanks for your love and support every single day, wish we will meet again soon.*
- Sepupu-sepupu tersayang, Kamal, Fufu, Maher (lagi), Ahmad (lagi), Samer, Danya, Hilda, dan keluarga lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, *kehadiran kalian bikin hidup gw jauh lebih menyenangkan.*
- Sahabat-sahabatku, *vivacious, biji*, sahabat yang sudah sekian tahun bareng-bareng, terima kasih untuk motivasinya.

- Pak Kusnindar, terima kasih banyak atas bantuannya, mulai dari kuliah saat kelas Studi Perumahan Kota, sampai membuka jalan dan mengenalkan saya pada orang-orang yang terlibat di perbaikan kampung, terima kasih atas diskusi-diskusinya yang menarik.
- Pak Daeng, terima kasih telah menemani survei pertama saya dan mengenalkan ke warga-warga Tugu Selatan, Pak Naji, terima kasih untuk data-data yang diberikan, Pak Nur, Pak Untung, Mbak Dian, terima kasih untuk diskusi singkatnya, Mbak Dhani, terima kasih untuk tesisnya yang cukup membantu.
- Warga Tugu Selatan, Pak Oban Sobari, Pakde Paijo, Ibu Sri, terima kasih atas tur keliling kampung, menemani saya walaupun panas-panasan, Bu Emi, Ibu Rosida, Ibu Nunung, dan ibu-ibu pengurus lainnya, terima kasih atas informasinya. Warga Tugu Selatan yang lain, bapak penjaga bengkel, ibu penjaga warung, tukang becak, supir bus, anak-anak, remaja, ibu, bapak dan kakek, yang tidak dapat saya sebutkan namanya karena hal tertentu, terima kasih atas obrolannya dan keramahannya.
- Pak Anthony Sihombing dan Pak Teguh Utomo selaku penguji sidang skripsi saya, terima kasih untuk saran-sarannya.
- Niesa, Affa, makasih bantuan *translating* abstraknya, teman-teman skripsi yang lain, Mas Upi, Chinet, Mia, Mbak Ty, Sherly, Imam, dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Teman-teman angkatan 2006 lain dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu terkait pada masa yang akan datang.

Depok, 22 Desember 2010

Syahru Banu

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahru Banu  
NPM : 0606076015  
Program Studi : Arsitektur  
Departemen : Arsitektur  
Fakultas : Teknik  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**JURANG ANTARA WACANA DAN PELAKSANAAN  
COMMUNITY-BASED DEVELOPMENT SEBAGAI PENDEKATAN  
TERHADAP MASALAH PERMUKIMAN KUMUH**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 22 Desember 2010

Yang menyatakan

(Syahru Banu)

## ABSTRAK

**Nama** : Syahru Banu  
**Program Studi** : Arsitektur  
**Judul** : **Jurang antara Wacana dan Pelaksanaan *Community-based Development* sebagai Pendekatan terhadap Masalah Permukiman Kumuh**

Dalam usaha menyelesaikan masalah permukiman kumuh, Dinas Perumahan DKI Jakarta menggunakan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada komunitas. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan permukiman kumuh dalam skala lokal dengan melibatkan anggota komunitas dalam prosesnya. Pendekatan tersebut meningkatkan potensi masyarakat untuk mencapai lingkungan permukiman berkelanjutan yang dikelola oleh warganya sendiri. Tugu Selatan merupakan salah satu kawasan yang menjadi target dan telah mengalami perbaikan permukiman sejak tahun 2006. Skripsi ini mengungkap realisasi pelaksanaan perbaikan permukiman di Tugu Selatan dengan berlandaskan rangkaian konsep pendekatan yang bertumpu pada komunitas, dan menganalisis kesesuaian antara wacana pembangunan yang bertumpu pada komunitas dan pelaksanaannya dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Melalui partisipasi masyarakat, skripsi ini mengidentifikasi masih adanya jurang antara wacana dan pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, skripsi ini menghasilkan gagasan yang dapat dikembangkan dalam dunia Arsitektur dan Desain Lingkungan dalam menjembatani wacana dan pelaksanaan sebuah gagasan atau konsep melalui rancangan.

Kata kunci: permukiman kumuh, *community-based development*, *citizen participation*, *sustainable architecture*



## ABSTRACT

**Name** : Syahru Banu  
**Study Program** : Architecture  
**Title** : **The Gap Between Theory and Practice of Community-based Development as an Approach to Slum Problems**

In an effort to solve the problem of slums, Housing Authority of DKI Jakarta employed community-based development as an approach. The approach was done by improving the slums area in local scale by involving community members in the process. The approach increases the potential of the society to achieve sustainable settlements that are managed by its own people. Tugu Selatan is one of the areas that is targeted and have experienced the improvement program since 2006. This thesis reveals the practice of the settlement improvement in Tugu Selatan based upon a series of concepts of community-based approach. It analyzes the suitability between the theory of community-based development and its practice in solving the problem of slums. By employing participatory approach, it identifies the persistence of the gap between the theory and the practice. Thus, this thesis generates ideas that can be developed in the world of Architecture and Environmental Design in bridging the theory and practice of an idea or concept through design.

**Keywords:** slum area, community-based development, citizen participation, sustainable architecture

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL/BAGAN	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat	4
1.4. Metode Kajian	4
1.5. Urutan Penulisan	7
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Konsep Kumuh – Permukiman Kumuh	9
2.1.1. Padanan Kata dan Pengertian	9
2.1.2. Karakteristik Permukiman Kumuh	10
2.1.3. Fungsi Permukiman Kumuh	12
2.1.4. Kriteria Permukiman Kumuh di DKI Jakarta	13
2.2. Pendekatan Terhadap Masalah Permukiman Kumuh	14
2.2.1. Pengantar	14
2.2.2. <i>Community Development / Community-based Development</i>	15
2.3. Prinsip Dasar <i>Community-based Development</i>	16
2.3.1. <i>Ecological Perspective</i>	17
2.3.2. <i>Social Justice Perspective</i>	19
2.4. <i>Citizen Participation</i>	23
2.5. <i>Sustainable Architecture</i>	26
2.6. Peran Praktisi dan Akademisi dalam Dunia Arsitektur dan Desain Lingkungan	29
2.7. Interpretasi terhadap Teori	31
<b>BAB 3 STUDI KASUS : PERBAIKAN KAMPUNG TERPADU TUGU SELATAN</b>	<b>34</b>
3.1. Perbaikan Kampung Terpadu	34
3.1.1. Maksud dan Tujuan Perbaikan Kampung Terpadu	35
3.1.2. Pola Penanganan	36
3.1.3. Metode Pelaksanaan	37
3.1.4. Strategi Penanganan	38
3.1.5. Sasaran Lokasi Perbaikan Kampung Terpadu	38

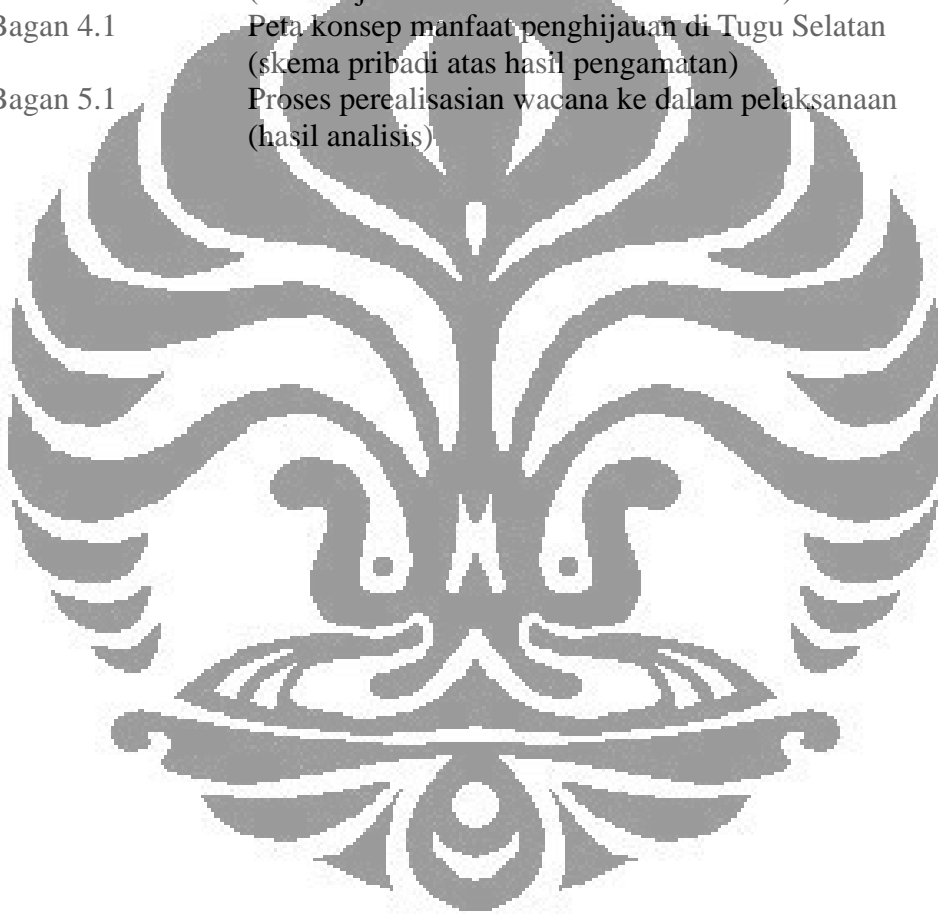
3.2.	Tugu Selatan	40
3.2.1.	Latar Belakang Kawasan Tugu Selatan	40
3.2.2.	Proses Perbaikan Kampung di Tugu Selatan	41
3.2.3.	Program Perbaikan Kampung Terpadu Tugu Selatan	44
<b>BAB 4</b>	<b>ANALISIS KASUS</b>	48
4.1.	Penghijauan Lingkungan : Kampung Kambing menjadi Kampung Kembang	48
4.2.	Analisis Penghijauan	52
4.2.1.	Konflik Intervensi Jalan	52
4.2.2.	Penghijauan vs Pencahayaan	54
4.2.3.	Drainase	55
4.2.4.	Pemerataan Penghijauan	57
4.3.	Analisis Partisipasi	58
4.3.1.	Partisipasi vs Mobilisasi	58
4.3.2.	Siapakah yang menjadi Partisipan?	59
<b>BAB 5</b>	<b>DISKUSI : JURANG ANTARA WACANA DAN PELAKSANAAN</b>	63
<b>BAB 6</b>	<b>PENUTUP</b>	69
6.1.	Kesimpulan	69
6.2.	Saran	70
<b>DAFTAR REFERENSI</b>		xiii

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Delapan tingkatan Partisipasi Masyarakat (Arnstein, 1969)	24
Gambar 3.1.	Pola Penanganan Perbaikan Kampung Terpadu	36
Gambar 3.2.	Metode Pelaksanaan Perbaikan Kampung Terpadu	37
Gambar 3.3.	Peta Tugu Selatan dan Pembagian RW Sasaran Perbaikan Kampung Terpadu	40
Gambar 3.4.	Perbaikan rumah bergulir di Tugu Selatan	44
Gambar 3.5.	Maesonet Type 36	45
Gambar 3.6.	Pelatihan kelembagaan koperasi	45
Gambar 3.7.	Perbaikan jalan lingkungan (kondisi tahun 2005-kiri dan tahun 2008-kanan)	46
Gambar 3.8.	Penghijauan lingkungan (kondisi tahun 2005-kiri dan tahun 2008-kanan)	46
Gambar 3.9	Salah satu septictank komunal di Tugu Selatan	47
Gambar 3.10	Proses daur ulang sampah untuk composting	47
Gambar 4.1	Kondisi RW.02 Tugu Selatan tahun 2005	50
Gambar 4.2	Kondisi RW.02 Tugu Selatan tahun 2010	50
Gambar 4.3	Tempat duduk di jalan, saung bersama, dan tanaman obat sebagai inisiatif warga	50
Gambar 4.4.	Kondisi jalan di RW.02 Tugu Selatan	53
Gambar 4.5	Ilustrasi kondisi jalan	53
Gambar 4.6	Kondisi beberapa rumah di RW.02 Tugu Selatan	54
Gambar 4.7	Ilustrasi pencahayaan	55
Gambar 4.8	Kondisi saluran air di RW.02 Tugu Selatan	56
Gambar 4.9.	Konsentrasi penghijauan di RW.02 Tugu Selatan	57

## DAFTAR TABEL / BAGAN

Bagan 1.	Bagan Metode Kajian	6
Tabel 2.1.	<i>Six Competing Logic of Sustainable Architecture</i> (Guy dan Farmer, 2001, h. 141)	27
Bagan 2.2.	Peta konsep prinsip <i>community-based development</i> (hasil interpretasi terhadap teori)	32
Bagan 2.3	Hubungan antara pendekatan, aktor, dan permasalahan (hasil interpretasi terhadap teori)	33
Tabel 3.1	Sasaran lokasi Perbaikan Kampung Terpadu	39
Bagan 3.2	Proses Perencanaan Perbaikan Kampung Terpadu (hasil kajian dokumentasi dan wawancara)	43
Bagan 4.1	Peta konsep manfaat penghijauan di Tugu Selatan (skema pribadi atas hasil pengamatan)	51
Bagan 5.1	Proses perealisasiian wacana ke dalam pelaksanaan (hasil analisis)	65



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ketika mengikuti kelas Studi Perumahan Kota, saya mempelajari mulai dari kebutuhan dasar manusia akan sebuah *shelter* / naungan, hunian, kemudian diartikan menjadi 'rumah', dan akhirnya mengenai usaha pemenuhan akan kebutuhan tersebut dengan penyediaan perumahan dan pembentukan permukiman. Beragam kuliah mengenai perumahan formal, informal, sampai rumah susun dengan istilah Apartemen untuk kelas menengah ke atas atau sejenis Rusunami dan Rusunawa untuk kelas bawah. Sampai suatu hari saya mengikuti kuliah dosen tamu oleh Bapak Kusnindar dari Dinas Perumahan DKI Jakarta mengenai permukiman kumuh, saya mulai tertarik. Selama ini yang saya tahu, solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh di Jakarta adalah dengan relokasi. Menggusur permukiman kumuh yang tidak layak huni, lalu penghuninya dipindahkan ke rumah susun yang dianggap lebih layak sekaligus menyelesaikan masalah kebutuhan lahan karena bentuknya yang vertikal. Namun ternyata dalam kuliah tersebut ada solusi lain yang dilakukan Pemda DKI Jakarta, yaitu Dinas Perumahan, untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh, yaitu dengan perbaikan permukiman dalam skala lokal, tanpa melakukan pemindahan/relokasi.

Selama ini yang saya tahu mengenai perbaikan permukiman kumuh tanpa penggusuran adalah yang dilakukan oleh Y. B. Mangunwijaya atau Romo Mangun di bantaran Kali Code, Yogyakarta. Perbaikan permukiman kumuh tersebut tidak terbatas pada perbaikan fisik hunian, namun juga sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh Romo Mangun adalah dengan mendampingi warga Kali Code untuk memperbaiki kampungnya sendiri. Romo Mangun mendampingi warga kali Code dari sisi mental, ekonomi, dan arsitektural. Pekerjaan warga kali Code dulunya pengemis, tukang gali dan

pemulung, dengan bimbingan Romo Mangun, sisi ekonomi mereka lambat laun membaik. Hal yang paling signifikan adalah penataan permukiman ini. Romo Mangun mengajak warga secara bersama-sama memperbaiki lingkungan mereka. Mereka memperbaiki sendiri rumah-rumah mereka dengan bambu dan mencatnya dengan warna-warna yang unik dan menarik. Kesadaran akan kebersihan dan kesinambungan lingkungan juga dikembangkan. Kawasan ini menjadi bersih dan rapi walau berada di bantaran kali. Romo Mangun menyelami sisi sosial ekonomi serta budaya orang-orang yang tinggal didalamnya. Ia dapat membimbing mereka dari sisi lingkungan dan arsitektural, pekerjaan, kebiasaan, dan sosial, sehingga budaya kekumuhan itu hilang dari kawasan itu.

Lalu kembali ke solusi serupa yang dilakukan oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta. Dalam kuliah tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian yang dilakukan dengan perbaikan kampung, yaitu dengan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pendekatan yang bertumpu pada komunitas. Menata permukiman kumuh dengan melibatkan anggota komunitas dalam prosesnya. Perbaikan dilakukan secara komprehensif yaitu dengan memperhatikan aspek fisik, sosial dan ekonomi (Tri Daya). Perbaikan kampung tersebut diharapkan tidak hanya dapat menyelesaikan masalah fisik tetapi juga meningkatkan potensi masyarakat dan dapat mencapai permukiman yang berkelanjutan yang dikelola oleh warganya sendiri.

Pendekatan yang dilakukan tersebut serupa dengan yang dilakukan Romo Mangun, yaitu dengan melibatkan komunitas dalam perbaikan kampungnya sendiri. Namun berbeda dengan Romo Mangun yang menghabiskan banyak waktu hidupnya dalam perbaikan permukiman kumuh Kali Code, perbaikan kampung di Jakarta tersebut dilakukan dalam waktu singkat, dan secara terpadu di beberapa titik di Jakarta yang dianggap sebagai permukiman kumuh. Lalu saya jadi mempertanyakan, bagaimana pelaksanaan perbaikan kampung di Jakarta tersebut? Apakah dalam waktu singkat perbaikan tersebut dapat berhasil dan meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup komunitasnya seperti yang dilakukan di Kali Code?

## 1.2. Perumusan Masalah

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan perbaikan permukiman kumuh yang dilakukan di Jakarta, tentunya saya harus mempelajari bagaimana pendekatan yang melandasinya. Pendekatan pembangunan yang bertumpu pada komunitas dengan aspek Tri Daya merujuk kepada konsep *Community Based Development*, dengan melibatkan peran serta masyarakat (*citizen participation*) dan untuk mencapai permukiman yang berkelanjutan merujuk ke konsep *Sustainable Architecture*. Keseluruhan teori atau konsep tersebut merupakan gagasan yang dijadikan prinsip atau landasan untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Saya melihat gagasan ideal akan sebuah pendekatan bertumpu pada komunitas sebagai sebuah wacana, dan aksi perealisasi gagasan tersebut sebagai sebuah pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Kemudian perumusan masalah dalam kajian akan wacana dan pelaksanaan tersebut adalah :

- (setelah melakukan kajian teori yang terkait) Bagaimana realisasi pelaksanaan perbaikan permukiman kumuh dilihat dari wacana yang melandasinya?
- Apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan gagasan yang melandasinya? Apabila pelaksanaan tersebut telah sesuai, apakah menyelesaikan masalah permukiman kumuh? Lalu bagaimana keberlanjutannya? Apabila tidak sesuai, mengapa pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan gagasan ideal yang melandasinya? Apa yang menyebabkan adanya jurang pemisah antara wacana dan pelaksanaan tersebut?



### 1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari pembahasan ini adalah :

- untuk mengetahui prinsip yang mendasari pendekatan pembangunan bertumpu pada komunitas yang dianggap sebagai cara yang ideal dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh
- untuk mengetahui bagaimana realisasi pelaksanaan prinsip tersebut dan pihak yang berperan dalam merealisasikan prinsip tersebut, serta kendala dan potensi dalam pelaksanaan terkait dengan prinsip tersebut
- terkait dengan Arsitektur dan Desain Lingkungan, untuk mengetahui gagasan apa yang perlu dipertimbangkan oleh para ahli sebagai pihak yang terlibat dan berperan secara langsung ataupun tidak langsung terkait masalah permukiman kumuh atau masalah lingkungan lainnya

Dengan demikian tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang-orang di dunia Arsitektur dan Desain Lingkungan sebagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung berperan untuk menjembatani antara wacana dan pelaksanaan sebuah gagasan atau konsep tertentu melalui desain, rancangan, atau solusi-solusi lainnya.

### 1.4. Metode Kajian

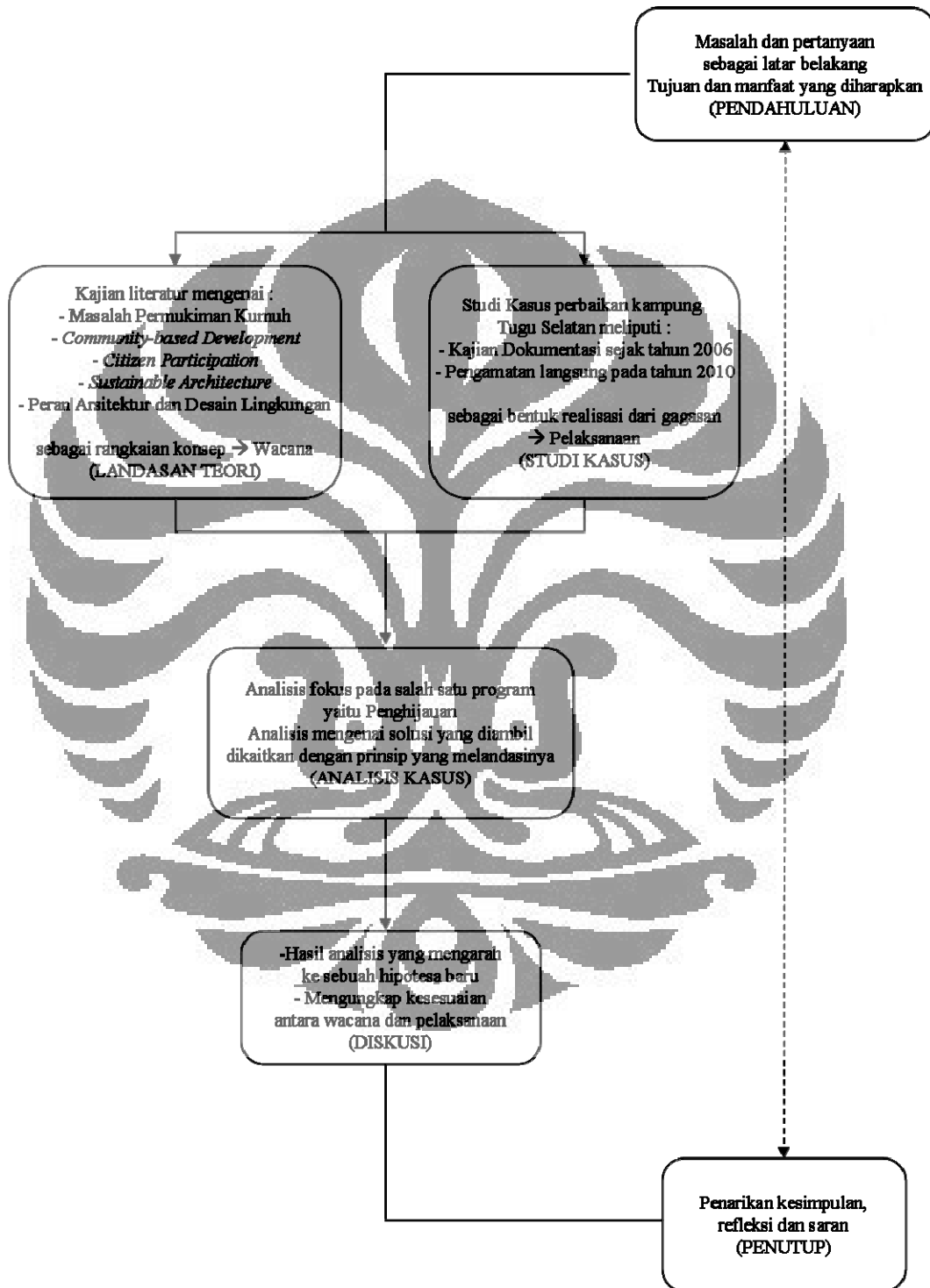
Untuk menjawab pertanyaan yang menjadi masalah tersebut, serta untuk mencapai tujuan dalam penulisan skripsi ini, saya melakukan metode berupa kajian literatur, kajian dokumentasi perbaikan permukiman kumuh, pengamatan langsung, kemudian menganalisis kesemuanya. Pertama saya melakukan kajian literatur mengenai permukiman kumuh. Mengenai pengertian dari kekumuhan itu sendiri serta karakter dan masalah apa saja yang ada di dalam permukiman kumuh. Kemudian mengarah ke pendekatan apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Terkait dengan pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta, konsep yang saya kaji adalah

pendekatan pembangunan yang bertumpu pada komunitas, yaitu *Community-based Development*. Karena pendekatan tersebut melibatkan peran serta masyarakat / komunitas, maka saya juga mengkaji konsep partisipasi masyarakat atau *citizen participation*. Konsep lain yang saya kaji adalah mengenai arsitektur berkelanjutan atau *sustainable architecture*, terkait dengan tujuan perbaikan permukiman yang berkelanjutan. Kemudian terkait dengan peran dunia Arsitektur dan Desain Lingkungan, saya juga mengkaji mengenai *design activism* sebagai konsep yang melihat peran orang-orang di dunia desain secara mendalam dan kritis. Keseluruhan konsep tersebut merupakan sebuah rangkaian prinsip atau gagasan yang menjadi wacana dalam melandasi sikap yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh.

Setelah merumuskan rangkaian gagasan tersebut, saya mengambil studi kasus sebagai bentuk pelaksanaan dari wacana yang ada. Studi kasus yang saya ambil adalah salah satu perbaikan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta, yaitu perbaikan kampung terpadu di Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara. Perbaikan kampung tersebut merupakan perbaikan kampung yang telah berjalan sejak tahun 2006 dan dianggap berhasil menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Studi kasus dilakukan dengan kajian dokumentasi mengenai perbaikan kampung sejak tahun 2006 serta pengamatan langsung untuk mengetahui keadaannya saat ini pada tahun 2010. Kajian dokumentasi untuk mengetahui bagaimana proses perbaikan yang telah dilakukan dan pengamatan langsung untuk mengetahui keberlanjutan perbaikan kampung tersebut.

Kemudian saya mencoba menganalisis perbaikan kampung yang dilakukan, dengan memfokuskan pada salah satu program dalam perbaikan kampung tersebut, yaitu penghijauan. Berdasarkan kajian awal mengenai rangkaian konsep yang dianggap sebagai wacana yang ideal, dikaitkan dengan kenyataan pelaksanaan yang ada di Tugu Selatan. Analisis tersebut mengantarkan ke diskusi mengenai bagaimana kaitan antara wacana dan pelaksanaan dalam *community-based development* sebagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Hasil diskusi akhirnya mengantarkan ke kesimpulan

mengenai upaya merealisasikan sebuah wacana ke dalam pelaksanaan. Serta manfaat apa yang dapat diambil terkait dengan peran dunia Arsitektur dan Desain Lingkungan. Dengan demikian metode kajian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :



Bagan 1  
Metode Kajian

## 1.5. Urutan Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini secara sistematis dituliskan sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini saya menjelaskan latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah berupa pertanyaan yang saya ajukan, tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini, serta metode kajian dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 LANDASAN TEORI**

Dalam bab landasan teori, saya mengkaji literatur mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang saya sebutkan sebelumnya. Konsep-konsep tersebut yaitu konsep mengenai permukiman kumuh dan permasalahannya, pendekatan *community-based development* dan prinsip-prinsip di dalamnya, konsep partisipasi masyarakat (*citizen participation*), *sustainable architecture*, dan posisi atau peran praktisi dan akademisi dalam dunia arsitektur dan desain lingkungan.

### **BAB 3 STUDI KASUS : TUGU SELATAN**

Bab ini berisi studi kasus yang saya lakukan di Tugu Selatan, Jakarta Utara sebagai salah satu target perbaikan kampung oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta. Studi kasus meliputi kajian dokumentasi proses perbaikan kampung sejak tahun 2006 dan pengamatan langsung pada tahun 2010.

### **BAB 4 ANALISIS KASUS**

Selanjutnya saya menganalisis mengenai perbaikan yang dilakukan di Tugu Selatan dengan memfokuskan pada salah satu program yaitu penghijauan. Analisis pelaksanaan perbaikan kampung di Tugu Selatan

juga dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam konsep yang telah di kaji di bab landasan teori.

## **BAB 5 DISKUSI**

Pada bab diskusi saya mengungkapkan realisasi konsep dalam pelaksanaan perbaikan kampung di Tugu Selatan. Kemudian saya membahas proses antara wacana dan pelaksanaan, aspek-aspek yang ada dalam proses tersebut serta peran-peran yang terlibat di dalamnya. Kemudian bahasan tersebut mengantarkan ke gagasan akan peran dunia arsitektur dan desain lingkungan dalam usaha menjembatani wacana dan pelaksanaan sebuah konsep atau gagasan pembangunan bertumpu pada komunitas.

## **BAB 6 PENUTUP**

Terakhir pada bab penutup, saya mencoba menyimpulkan antara wacana dan pelaksanaan perbaikan kampung di Tugu Selatan, refleksi terhadap kajian, serta saran untuk mengembangkan kajian.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Kumuh – Permukiman Kumuh

##### 2.1.1. Padanan Kata dan Pengertian

Kata “kumuh” merupakan terjemahan yang digunakan untuk mengartikan kata “*slum*”. *Slum* / kumuh memiliki konotasi yang negatif. Namun sebenarnya *slum* dapat berbeda-beda artinya tergantung dari masalah “kekumuhan” yang ada.

Berdasarkan *Oxford Dictionaries Online*, *Slum* adalah :

***Noun***

*Very poor area of a city where the houses are dirty and in a bad condition*

***Verb***

*Spend time in places that are much worse than you are used to*

Pengertian lain berdasarkan *Oxford Dictionaries Online* adalah :

***Noun***

*a squalid and overcrowded urban street or district inhabited by very poor people*

- *a house or building unfit for human habitation*

***Verb***

*Spend time at a lower social level than one's own through curiosity or for charitable purposes*

- *(slum it) put up with conditions that are less comfortable or of a lower quality than one is used to*

Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, kata kumuh adalah :

**kumuh** *a* cemar (tt wilayah, kampung, dsb); kotor: *ia terpaksa tinggal di daerah*

**me·ngu·muh·kan** *v* mengotorkan

**ke·ku·muh·an** *n* hal (keadaan, sifat, dsb) kumuh

Secara bahasa, dapat terlihat bahwa *slum* terkait erat dengan kondisi fisik kawasan yang kotor, tidak nyaman atau tidak sehat, juga berkaitan dengan kondisi sosial serta kepadatan penduduk.

Konsep kumuh dapat berbeda artinya di setiap kawasan, tergantung dari masalah yang ada pada kawasan tersebut. *A slum should be judged physically according to the general living standards of a country* (Clinard, 1966, h.4). Kumuh juga harus diperbandingkan dengan standar hidup di negara dimana kawasan itu berada. Suatu kawasan di Amerika dikatakan kumuh misalnya, belum tentu disebut kumuh di Indonesia. Hal tersebut karena standar hidup mayoritas di kedua negara tersebut berbeda. Oleh karena itu perlu dijabarkan kembali kriteria permukiman yang kumuh di Indonesia pada umumnya, dan di Jakarta pada khususnya.

### 2.1.2. Karakteristik Permukiman Kumuh

*Slum are vary from one type to another, but certain general patterns of slum life are universal. Although the slum is generally characterized by inadequate housing, deficient facilities, overcrowding, and congestion, it involves much more than these elements. Sociologically it is a way of life, a subculture with a set of norms and values, which is reflected poor sanitation and health practices, deviant behavior, and characteristic attributes of apathy and social isolation. People who live in slum area are isolated*

*from the general power structures and are regarded as inferior, and slum dwellers, in turn, harbor suspicions of the outside world* (Clinard, 1966, h.3).

Banyak sekali elemen yang bisa dilihat untuk menentukan kawasan tersebut termasuk kumuh atau tidak. Berdasarkan buku *Slum and Community Development* karya Marshall B. Clinard (1966), elemen-elemen yang diperhatikan sebagai karakter permukiman kumuh adalah :

- *Housing Conditions*
- *Overcrowding and Congestion*
- *Neighborhood Facilities*
- *Poor Sanitation and Health*
- *Deviant Behavior*
- *The Culture of the Slum*
- *Apathy and Social Isolation*

Sebuah kawasan dikatakan kumuh, apabila memiliki karakter-karakter tersebut. Namun masalah pada tiap kawasan bisa saja berbeda-beda. Mungkin saja sebuah kawasan memiliki kondisi sosial yang sudah baik, tidak ada perilaku kriminal atau masalah sosial pada warganya, namun kondisi fisik kawasan tersebut kotor dan tidak sehat, sehingga kawasan tersebut dapat dikatakan kumuh.

Permukiman kumuh juga erat dengan masalah ekonomi atau kemiskinan. Masyarakat yang tinggal dipermukiman kumuh mayoritas merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga kurangnya organisasi dalam pemeliharaan sebuah kawasan permukiman, yang akhirnya mengakibatkan kawasan yang kotor dan tidak sehat. Selain itu adanya budaya kekumuhan, yang erat dengan budaya kemiskinan. Budaya kekumuhan lebih merupakan pola perilaku, cara hidup, atau kebiasaan. Adanya rasa inferior pada warganya, yang akhirnya mengarah ke sifat apatis dan isolasi sosial dari lingkungan yang lebih besar darinya. Namun bukan berarti semua



penduduk miskin atau semua warga permukiman kumuh memiliki budaya kekumuhan tersebut. Mungkin saja seorang miskin, dan hidup di permukiman kumuh, namun memiliki cara hidup yang berbeda.

### 2.1.3. Fungsi Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh sebenarnya juga memiliki fungsi dari eksistensinya dalam sebuah kota. Seperti yang dijelaskan oleh Clinard (1966), slum memiliki fungsi sebagai berikut :

- *Housing for poor and the migrant*

Harga sewa yang murah menjadikan kawasan kumuh menjadi area bermukim masyarakat berpenghasilan rendah ataupun para pendatang yang baru mulai mengadu nasib di kota besar.

- *Group Associations*

Rasa memiliki antar masyarakat kumuh menciptakan sebuah asosiasi yang didasari a feeling of belonging dan senasib sepenanggungan

- *Education for Urban Life*

Para pendatang dari area rural dapat menjadikan kawasan ini sebagai sarana “belajar” bagaimana cara hidup di kota besar

- *Demand for Anonymity*

Permukiman kumuh sangat berguna bagi orang yang sering berpindah-pindah, memiliki hidup yang anonym (tanpa identitas / *double indentitas*), serta orang yang “ditolak” dimana-mana.

#### 2.1.4. Kriteria Permukiman Kumuh di DKI Jakarta

Dalam penataan kawasan di DKI Jakarta, terdapat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman. Salah satunya adalah kriteria permukiman kumuh dengan ciri-ciri fisik tertentu. Hal tersebut nantinya yang akan dijadikan landasan tentang masalah apa yang harus diselesaikan untuk menghilangkan masalah “kekumuhan” tersebut.

Berdasarkan data yang saya dapat dari kuliah dosen tamu Bapak Kusnindar dari Dinas Perumahan DKI Jakarta, berikut adalah indikator kumuh yang digunakan untuk menentukan kriteria permukiman kumuh / pengklasifikasian permukiman kumuh di Jakarta.

- Kepadatan Penduduk
- Tata Letak Bangunan
- Keadaan Konstruksi Bangunan Tempat Tinggal
- Ventilasi Perumahan
- Kepadatan Bangunan
- Keadaan Jalan
- Drainase/saluran air
- Pemakaian Air Bersih Penduduk
- Pembuangan Limbah Manusia
- Pengolahan Sampah

Indikator tersebut yang akhirnya menentukan kriteria permukiman kumuh di Jakarta, yaitu :

- Kumuh Berat
- Kumuh Sedang
- Kumuh Ringan
- Kumuh Sangat Ringan
- Tidak Kumuh

## 2.2. Pendekatan terhadap Masalah Permukiman Kumuh

### 2.2.1. Pengantar

Banyak pendekatan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Diantaranya pemberantasan permukiman kumuh dan relokasi, layanan masyarakat, atau berbagai sumbangan kepada warga permukiman kumuh dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Ataupun peningkatan kesempatan dalam bidang ekonomi dengan berbagai pelatihan keterampilan pada warga di area permukiman kumuh. Namun berbagai cara tersebut memiliki kekurangan dan keterbatasan tertentu. Solusi-solusi tersebut dirasa tidak dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh atau mencapai target yang seharusnya.

Seperti contohnya cara relokasi yang selalu menimbulkan masalah dari warga yang dipindahkan. Mereka merasa tidak puas dengan kondisi sosial tempat yang baru, mereka merasa kehilangan lapangan pekerjaan di tempat lama mereka tinggal, dan yang paling sering terjadi, mereka merasa terbebani dengan biaya sewa di tempat yang baru. Solusi lain seperti pelatihan keterampilan juga sering kali tidak mendapatkan partisipan yang sesuai target. Karena masyarakat dengan ekonomi ke bawah lebih mementingkan penggunaan waktunya untuk bekerja daripada mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Sehingga usaha dan dana yang dilakukan tidak sesuai dengan target yang dicapai.

Lalu ada cara lain yang mulai digunakan dan dirasa lebih efektif. Yaitu dengan menggunakan kekuatan dari komunitas itu sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Istilah seperti *self-help*, *citizen participation*, atau *community development*, merupakan istilah yang biasa kita dengar untuk menjelaskan solusi baru tersebut.

### 2.2.2. *Community Development / Community-based Development*

Terdapat kebingungan dalam penggunaan istilah seperti *community development*, *community work*, *community action*, *community-based development*, *community-based services*, dll. Tidak ada penjelasan baku akan tiap istilah tersebut. Seperti penggunaan kata *community-based* yang dipakai dalam pendekatan untuk menyelesaikan masalah permukiman atau perumahan. Interpretasi terhadap istilah *community development* atau *community-based development* dapat berbeda arti pada orang yang berbeda. Namun istilah-istilah tersebut dapat dipahami dari esensi dan tujuannya. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang berbasis atau bertumpu pada masyarakat / komunitas, pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan komunitas, menggunakan kekuatan / kekuasaan komunitas sendiri dalam menyelesaikan masalahnya, dalam hal ini masalah permukiman. Oleh karena itu yang menjadi kritikal aspek dalam pendekatan ini adalah komunitas itu sendiri. “*How can there be community-based services if there is no community in which to base them?*” (Ife, 1995, h. 14).

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, masalah permukiman kumuh bukan hanya sekedar masalah fisik lingkungan, tetapi juga masalah kemanusiaan. “*This is what make slums a human problem rather than a problem of finance and real estate*” (Clinard, 1966, h.15). Oleh karena itu dalam pendekatan *community development*, semua aspek yang menjadi pertimbangan bertumpu kepada masyarakat / komunitas. Pembangunan dan penguatan komunitas yang diutamakan. Tentunya seiring dengan pembangunan fisik lingkungan mereka tinggal.

### 2.3. Prinsip Dasar Community-based Development

Dalam istilah *community-based development*, terdapat kata *community* / komunitas dimana pembangunan itu bertumpu. Komunitas tidak hanya sekumpulan orang yang tinggal di tempat yang sama, komunitas juga berada dalam skala yang kecil sehingga interaksi di dalamnya dapat di kontrol dan digunakan oleh tiap individu didalamnya. Skala tersebut juga membuat anggota dalam komunitas dapat mengenal satu sama lain, memiliki *sense of belonging*, walaupun terdapat komunitas dengan latar belakang yang heterogen, namun kesamaan tempat bertinggal juga dapat menciptakan *sense of belonging* tersebut. Komunitas dengan latar belakang yang homogen biasanya lebih memiliki identitas yang jelas, karena *sense of belonging* mereka lebih kuat. Sedangkan komunitas modern yang ada di perkotaan yang sangat heterogen dan individualis sering kali *lack of identity*. Dalam komunitas juga memiliki semacam tanggung jawab dari anggota ke komunitasnya. Tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kehidupan komunitasnya, atau paling tidak ikut serta secara aktif dalam beberapa aktifitas di komunitasnya. Karakter dari komunitas tersebut, dengan skalanya yang kecil dan keterikatan antar anggotanya yang lebih kuat dibanding skala besar dari sebuah *society*, merupakan sebuah potensi yang digunakan dalam pendekatan *community-based development*.

Dalam buku *Community Development, Creating community alternatives – vision, analysis and practice* karya Jim Ife (1995), dikatakan bahwa pendekatan kearah *community work* bergantung pada dua prinsip dasar, yaitu *ecological perspective* dan *social justice perspective*. Masing-masing perspektif memiliki pengaruh dalam menstimulasi solusi yang bertumpu kepada komunitas dalam menyelesaikan masalah dan dalam mendukung praktek dari *community development*, namun untuk mengintegrasikan kedua prinsip tersebut bukanlah hal yang mudah.

### 2.3.1. *Ecological Perspective*

Dalam *ecological perspective*, masalah yang terkait adalah masalah makhluk hidup dengan lingkungannya, masalah krisis lingkungan yang saat ini terjadi. Istilah-istilah seperti *green*, *sustainable*, *holism*, terkandung dalam perspektif ini. Dalam *ecological perspective*, terdapat empat prinsip dasar, yaitu *holism*, *sustainability*, *diversity* dan *equilibrium*.

#### - *Holism*

*The principle of holism requires that every event or phenomenon must be seen as a part of a whole, and that it can only be properly understood with reference to every other part of the larger system (Ife, 1995, h.44).*

Keseluruhan aspek secara ideal harus dilihat hubungan dan interaksinya satu sama lain. Seolah tidak ada awal dan akhir dalam sebuah proses, tidak ada batasan yang jelas, antara aspek fisik dan sosial dilihat sebagai ikatan dengan hubungan yang kompleks dan saling terintegrasi. Bukan diferensiasi dan klasifikasi yang diutamakan, tetapi integrasi dan sintesislah yang menjadi dasar.

#### - *Sustainability*

*The principle of sustainability means that systems must be able to be maintained in the long term, that resources should be used only at the rate at which they can be replenished, that renewable energy sources should be utilised, that output to the environment should be limited to the level at which it can adequately be absorbed, and that consumption should be minimised rather than maximised (Ife, 1995, h. 45).*

Keberlanjutan dari lingkungan kita dan manusia tentunya menjadi hal yang paling penting. Solusi untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang hidup saat ini tentunya harus mempertimbangkan pemenuhan

kebutuhan dalam kehidupan manusia yang akan datang. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya dari lingkungan tidak dengan 'serakah' dihabiskan, bahkan upaya untuk memperbaiki energi ataupun efisiensi energi, sangat diusahakan.

*Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Brundtland Report, 1987).*

- *Diversity*

*The principle of diversity maintains that there is not necessarily just one answer, or one right way of doing things, and so encourages a range of responses (Ife, 1995, h.46).*

Maksud dari *diversity*, perbedaan yang ada bukanlah menjadi sebuah masalah atau bencana, tetapi dapat membuat manusia dapat belajar dari pengalaman manusia lain yang berbeda. Dalam memecahkan masalah, bukan secara arogan menentukan "solusi terbaik", tetapi memberi kesempatan untuk mencari cara-cara lain untuk melakukannya. Bertolak-belakang dengan *uniformity*, yang menyamaratakan semuanya, *diversity* memberi kesempatan dan mendukung manusia untuk mencari solusi lokalnya sendiri dan dengan caranya sendiri.

- *Equilibrium*

*Thus, dualism – such as male and female, yin and yang, competition and co-operation, central and local, theory and practice, mind and body, personal and political, fact and value, or subjective and objective – are not seen in 'all or nothing' terms, but rather are integrated within a perspective of dynamic tension. It is the balance between them which is important, and which must be maintained (Ife, 1995, h.48).*

Dalam pendekatan *community-based development*, keseimbangan antara berbagai aspek dualisme yang perlu dipertahankan. Tidak hanya antara manusia dengan lingkungannya secara umum, tetapi juga antara elemen-elemen dalam lingkungannya serta keseimbangan di dalam struktur sosial masyarakatnya sendiri.

### 2.3.2. *Social Justice Perspective*

Pondasi atau dasar lainnya dalam *community development* adalah dilihat dari *social justice perspective*. Perspektif tersebut didasari oleh enam prinsip, yaitu *structural disadvantage, empowerment, needs, rights, peace and non-violence, and participatory democracy*.

#### - *Structural disadvantage*

Pembagian structural memiliki kelemahan, seperti efek dari pembagian kelas masyarakat, institusi, gender, ras atau etnik, dll. Kesemuanya itu merupakan bagian dari masyarakat, namun kelemahannya adalah berimbas ke masalah ketidaksetaraan (*inequity*), lemahnya kontrol minoritas, dll yang bertolak-belakang dengan *social justice*.

#### - *Empowerment*

*Empowerment aims to increase the power of the disadvantaged* (Ife, 1995, h.56).

*Empowerment* dalam strategi *community-based development* adalah meningkatkan kekuatan atau kekuasaan dari masyarakat / komunitas. *Power* yang dimaksud adalah kekuatan atau kekuasaan dalam menentukan pilihan dan kesempatan hidup, dalam mendefinisikan *needs* atau kebutuhannya sendiri, kekuatan dalam memberikan ide-ide, untuk dapat mengakses institusi-institusi (pendidikan, kesehatan, pemerintahan, layanan masyarakat, dll), kekuatan dalam akses akan sumber daya, aktifitas ekonomi, dll.



*...giving power to individual or groups, allowing them to take power into their own hands, redistributing power from the 'haves' to the 'have not', and so on (Ife, 1995, h.56)*

- *Needs*

*There are two ways in which need is seen as basic to social justice and community developments : firstly, a belief that people or communities should have their needs 'met', and secondly, that people or communities should be able to define their own needs rather than have them define by others (Ife, 1995, h.65).*

Dalam mendefinisikan kebutuhannya, komunitas memiliki keterbatasan dari segi pengetahuan dan kemampuan verbal untuk mendefinisikan kebutuhannya. Oleh karena itu seringkali para ahli seperti pemerintah, arsitek, peneliti, *planner*, konsultan, pekerja sosial, dll, yang mendefinisikan kebutuhannya mereka, dilatarbelakangi dari pengetahuan mereka yang lebih luas dan kemampuan mereka sebagai *need-definer*. Namun kecenderungan dari para ahli dapat saja berbeda-beda dalam mendefinisikan kebutuhan komunitas, sesuai dengan latar belakangnya, ideologi, pengetahuan, dll. Seperti misalnya pekerja sosial yang lebih cenderung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat namun memiliki *self-interest* tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Atau peneliti dan perancang yang terbiasa dengan statistik, hasil survey, dan data lainnya, tentunya berpengaruh dalam cara ia mendefinisikan kebutuhan komunitas.

Oleh karena itu, perlunya *empowerment* seperti yang disebutkan sebelumnya, untuk meningkatkan kemampuan komunitas dalam mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri. Karena sebesar apapun pengetahuan para ahli tersebut, komunitaslah yang 'hidup' di lingkungannya, merekalah yang seharusnya paling mengenal apa yang mereka butuhkan. Para ahli bertugas sebagai pembimbing, pembuka wawasan, dan pemberi kesempatan bagi komunitas.

- *Rights*

*Social justice implies some view of fairness and equity, and the principles on which notions of fairness or equity are based generally involve some reference to rights (Ife, 1995, h. 69).*

Masyarakat perlu untuk mengetahui hak-hak mereka, atau dibantu untuk mendefinisikan hak-hak mereka. Misalnya dalam pendekatan *community-based development*, masyarakat berhak untuk didengar ide-ide dan pendapatnya, hak untuk terlibat dalam *decision-making process* atau proses pengambilan keputusan, hak untuk mendapatkan kesetaraan, dll. Tidak hanya untuk mendapatkan haknya, karena hak selalu memiliki hubungan timbal balik dengan kewajiban. Misalnya apabila masyarakat mendapatkan haknya untuk didengar dan memberikan ide, ia juga harus memahami kewajibannya untuk berpartisipasi atau mendukung terwujudnya ide-ide tersebut.

- *Peace and non-violence*

*Peace* dan *non-violence* yang dimaksud dalam pendekatan *community development* ini bisa dipahami secara sederhana. Misalnya terkait dengan konflik yang timbul dalam komunitas, tekanan dalam masyarakat, konflik antara individual dan grup, ketidaksetaraan (*inequity*), kompetisi yang dapat menimbulkan dominasi pihak tertentu, dll.

- *Participatory democracy*

*In participatory democracy, 'the people' participate directly in decision-making, while in representative democracy the role of 'the people' is to select (usually through elections) those who are then entrusted to make the decisions on their behalf (Ife, 1995, h. 75).*

Elemen yang kritikal disini adalah *'the people'*. Siapa yang menjadi partisipan? Apakah partisipan tersebut benar-benar mewakili komunitas? Dalam *participatory democracy*, masyarakat mempunyai *'power'* untuk terlibat. Distribusi kekuasaan tersebut merata. Sedangkan dalam *representative democracy*, kecenderungan distribusi kekuasaan ke para *'elite'* atau orang yang *'terpilih'* dan dianggap mewakili komunitas, sehingga dampaknya terdapat *'disempowerment'* bagi masyarakat / komunitas secara keseluruhan.

Dalam konteks pendekatan *community-based development*, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam proses desain (perencanaan dan perancangan) dan proses pengambilan keputusan. Komunitas dapat memberikan ide dan pendapat, memberi tahu apa yang mereka butuhkan, mengevaluasi, dll. Namun untuk mencapai itu tidak dengan mudah, sebelumnya ada proses edukasi atau pembukaan wawasan ke masyarakat. Bagaimana mereka dapat memberikan ide dan pendapat kalau pengetahuan mereka hanya terbatas pada apa yang mereka lihat dan rasakan di sekitar mereka? Selain itu hal lain lain yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana batasan masyarakat tersebut dapat berperan serta? Seberapa besar kapasitas mereka untuk terlibat? Dan yang paling penting apakah ide mereka tersebut didengar dan direalisasikan?

Menurut Jim Ife (1995) dalam buku *Community Development*, ada empat karakteristik dari pendekatan *participatory democracy* yang penting dalam *community development*, yaitu *decentralisation, accountability, education, dan obligation* (h. 72).

*Decentralisation*, terdapat penyebaran atau distribusi kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Ruang lingkup yang lebih kecil memungkinkan mudahnya akses bagi komunitas untuk berpartisipasi.

*Accountability*, tidak hanya memberi kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, namun juga pertanggungjawaban untuk merealisasikan keputusan tersebut.

*Education*, apabila masyarakat berpartisipasi, tentunya mereka harus memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup, sehingga dibutuhkan program edukasi agar proses partisipasi dapat berjalan dengan baik.

*Obligation*, dalam mendapatkan hak, tentunya ada tanggung jawab untuk menjalankannya, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya dalam bahasan *rights*. *Participatory democracy* tidak hanya memenuhi hak masyarakat dalam mendapat kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menyadarkan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam menjalankan keputusan yang diambil tersebut.

#### 2.4. *Citizen Participation*

*Participation* secara singkat dapat diartikan sebagai ‘peran serta’. Dalam menyelesaikan masalah permukiman yang bertumpu pada masyarakat / komunitas, partisipasi menjadi aspek yang penting. Melalui partisipasi, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan ide, menyatakan apa yang ia butuhkan, bahkan terlibat dalam proses pencarian solusi dan pengambilan keputusan. Dalam konsep partisipasi, masyarakat mempunyai kekuasaan atau *power* untuk terlibat.

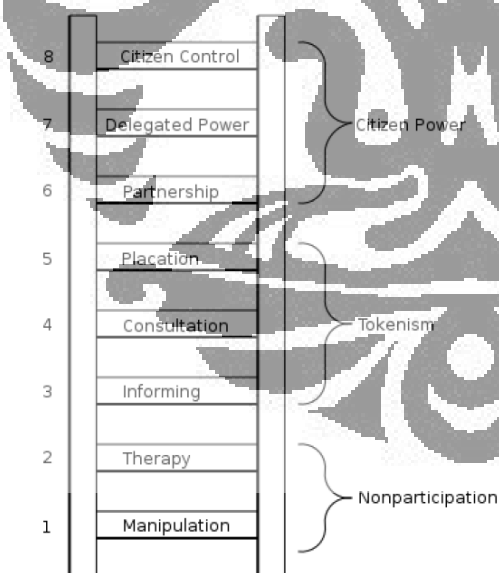
Sherry R. Arnstein dalam tulisannya *A Ladder of Citizen Participation*, menyatakan

“...*citizen participation is a categorical term for citizen power. It is the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded from the political and economic processes, to be deliberately included in the future.*”

Menurut Arnstein, partisipasi masyarakat adalah kekuatan / kekuasaan masyarakat. Terdapat distribusi kekuasaan yang membuat masyarakat yang tak memiliki kekuasaan tersebut, masyarakat yang saat ini tidak terlibat dalam proses politik dan ekonomi, secara sengaja menjadi dilibatkan.

Arnstein kemudian mengkritik proses partisipasi tersebut, *“There is a critical difference between going through the empty ritual of participation and having the real power needed to affect the outcome of the process.”* Untuk mendapatkan the *real power* tersebut, dibutuhkan pendistribusian kembali akan kekuasaan ke tangan masyarakat. *“participation without redistribution of power is an empty and frustrating process for the powerless.”*

Terdapat pertanyaan seperti seberapa jauh masyarakat terlibat? Atau seberapa besar kekuasaan masyarakat untuk dapat menentukan atau mempengaruhi hasil akhir dari proses tersebut?



Lebih lanjut Arnstein membuat delapan level atau tingkatan pada partisipasi. Kendati ia juga menyatakan bahwa pada kenyataannya terdapat jauh lebih banyak tingkatan dengan batasan yang buram. Arnstein mengilustrasikan tingkatan partisipasi tersebut seperti anak tangga.

Gambar 2.1  
Delapan Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Dua tingkat paling bawah merupakan level dari *“Nonparticipation”*. *Manipulation* dan *therapy* untuk menggantikan partisipasi yang sebenarnya. Tujuannya bukan untuk memberi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi,

“but to enable powerholders to “educate” or “cure” the participants.” Kemudian tingkat ketiga sampai kelima termasuk dalam level “tokenism”, adalah *informing*, *consultation* dan *placation*. Pada tingkat *informing* dan *consultation*, masyarakat diberikan kesempatan untuk mendapat informasi dan memberikan suaranya, ada kesempatan untuk mendengar dan didengar. Namun dalam kondisi ini, masyarakat tidak memiliki kekuasaan yang cukup untuk memastikan bahwa sudut pandang mereka tersebut ditindaklanjuti atau tidak. *Placation* lebih tinggi tingkatannya, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya (*opinion* dan *advice*). Namun pengambilan keputusan tetap pada pemegang kekuasaan.

Tiga tingkatan tertinggi menurut Arnstein barulah yang merupakan *citizen participation* atau *citizen power*. Terdapat *partnership*, *delegated power*, dan *citizen power* pada tingkatan teratas. Pada level ini terdapat peningkatan akan besarnya pengaruh masyarakat dalam pengambilan keputusan. *Partnership* yang memungkinkan masyarakat untuk bernegosiasi dan bermitra dengan pemegang kekuasaan. Sedangkan pada *delegated power* dan *citizen control*, masyarakat mendapatkan kekuasaan untuk mendominasi pengambilan keputusan atau memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol jalannya proses.

Dalam pelaksanaannya pada proses perencanaan dan perancangan, partisipasi bukanlah hal yang mudah. Antipati masyarakat, keterbatasan pengetahuan masyarakat, atau kemampuan para ahli seperti perancang dan pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat yang dianggap ‘dibawah’ mereka juga dapat menjadi kendala. Seperti yang dinyatakan Godsehalck (1972), “*Participation is a two-edged sword ; planners must be open to working with citizens, and citizens must be active and competent in planning*” (Fagence, 1977, h.4)

Melihat pendapat Arnstein (1969) akan *citizen participation*, peran serta masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan diutamakan. Namun Fagence dalam bukunya *Citizen Participation in Planning* (1977) memberikan semacam peringatan, “*participation is an addition to, not a substitute for, professional planning, i.e. the public’s role is complementary to those of the planning expert and the responsible politician*” (h. 122).

## 2.5. *Sustainable Architecture*

Apabila mendengar kata *sustainability* atau keberlanjutan, biasanya mengarah ke kata “*green*”, efisiensi energi, *recycle*, dll. *Sustainability* tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga keberlanjutan sosial atau ekonomi. Lebih spesifik lagi, mendengar istilah *sustainable architecture*, mungkin akan terbayang desain bangunan ‘canggih’ yang sangat ramah lingkungan. Desain yang menggunakan teknologi canggih untuk menghemat energi, istilah-istilah seperti *energy-efficient window and wall, photovoltaic, green roof*, dll. Hal lain yang terbayang mungkin bangunan dengan material yang ramah lingkungan, menggunakan bahan yang di daur ulang, atau mungkin terbayangkan arsitektur lokal dengan kearifannya.

Banyak sudut pandang yang berbeda dalam mengartikan *sustainable architecture*. Susan Maxman mengatakan, “*sustainable architecture isn’t a prescription. Its an approach, an attitude. It shouldn’t really even have a label. It should just be architecture*” (Guy dan Farmer, 2001, h.140).

Simon Guy dan Graham Farmer dalam tulisannya *Reinterpreting Sustainable Architecture : The Place of Technology*, mencoba meninterpretasikan kembali mengenai *sustainable architecture*. Melihat berbagai sudut pandang mengenai pengertian *sustainable architecture*, Guy dan Farmer (2001) mencoba menginterpretasikannya dengan cara yang “*relative rather than an absolute sense*”. Melihat perbedaan itu sebagai sebuah alternatif dalam strategi akan lingkungan dengan pertimbangan akan berbagai kemungkinan yang ada.

Dalam analisis Guy dan Farmer (2001), terdapat enam ‘*environmental logic*’. Mereka mendefinisikan *logic* disini sebagai “*a specific ensemble of ideas, concepts and categorisations that are produced, reproduced and transformed in a particular set of practices through which meaning is given to social and physical realities*” (Guy dan Farmer, 2001, h. 141). Keenam *logic* disini tidak berdiri sendiri atau ada *logic* tertentu yang mendominasi.

“*In practice, logic may merge or simply be absent as exemplified by analysis of any individual building*” (Guy dan Farmer, 2001, h. 141).

Table 1 The six competing logics of sustainable architecture

Logic	Image of Space	Source of Environmental Knowledge	Building Image	Technologies	Idealized Concept of Place
Eco-technic	global context macrophysical	technorational scientific	commercial modern future oriented	integrated energy efficient high-tech intelligent	Integration of global environmental concerns into conventional building design strategies. Urban vision of the compact and dense city.
Eco-centric	fragile microbiotic	systemic ecology metaphysical holism	polluter parasitic consumer	autonomous renewable recycled intermediate	Harmony with nature through decentralized, autonomous buildings with limited ecological footprints. Ensuring the stability, integrity, and "flourishing" of local and global biodiversity.
Eco-aesthetic	alienating anthropocentric	sensual postmodern science	iconic architectural New Age	pragmatic new nonlinear organic	Universally reconstructed in the light of new ecological knowledge and transforming our consciousness of nature.
Eco-cultural	cultural context regional	phenomenology cultural ecology	authentic harmonious typological	local low-tech commonplace vernacular	Learning to "dwell" through buildings adapted to local and bioregional physical and cultural characteristics.
Eco-medical	polluted hazardous	medical clinical ecology	healthy living caring	passive nontoxic natural tactile	A natural and tactile environment which ensures the health, well-being, and quality of life for individuals.
Eco-social	social context hierarchical	sociology social ecology	democratic home individual	flexible participatory appropriate locally managed	Reconciliation of individual and community in socially cohesive manner through decentralized "organic", nonhierarchical, and participatory communities.

Tabel 2.1

*Six Competing Logics of Sustainable Architecture* (Guy dan Farmer, 2001, h. 141)

Dalam pendekatan *eco-technic*, konteksnya lebih universal, masalah yang menjadi fokus seperti masalah perubahan iklim, pemanasan global, masalah lubang di lapisan ozon, dll. Penyelesaiannya lebih mengarah ke teknologi, sains dan manajemen, "*science and technology can provide the solutions to environmental problem*" (Guy dan Farmer, 2001, h. 142). Solusi-solusi yang muncul sangat '*high-tech*', seperti solar energi, *double-glass window*, *photovoltaic*, *energy management system*, dll. Sedangkan pendekatan *eco-centric*, konsep ruang yang diciptakan lebih harmoni dengan alam, alam dilihat sebagai suatu yang rapuh, dan mudah dirusak, dan perlu dilindungi. Bangunan menjadi semacam '*act against nature*' (Guy dan Farmer, 2001, h. 143). Namun karena bangunan merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan esensial, maka kemudian "*the aim is to radically reduce the 'ecological footprint' of building*" (Guy dan Farmer, 2001, h. 143).

Pendekatan *eco-aesthetic* menggunakan bahasa dalam seni bangunan, keindahan, kreatifitas, dikombinasikan dengan "*a romantic view of nature*", "*only if men can first learn to look sensuously at the world will they learn to care for it*" (Guy dan Farmer, 2001, h.143). Sedangkan pendekatan *eco-medical* lebih mengarah ke



‘kehidupan yang sehat’, manusia yang sehat membentuk lingkungan yang sehat, dan juga sebaliknya. “*where the concepts of health and ecology are interwoven, and the aim is to design building that meet our physical, biological, and spiritual needs*” (Guy dan Farmer, 2001, h. 145)

Dalam kaitannya dengan pendekatan *community-based development*, *logic* yang ‘bertemu’ dengan konsep *community-based development* adalah *eco-cultural* dan *eco-social*.

#### *The Eco-cultural Logic – Buildings and the Authentic Place*

Berbeda dengan *eco-technic* yang konteksnya lebih universal, *eco-cultural* konteksnya lebih regional. Bukan dengan membentuk sebuah “*new universal culture*”, namun dengan mengelola dan mengembangkan “*a diversity of existing cultures*” (Guy dan Farmer, 2001, h. 144). *Eco-cultural* menghargai nilai-nilai lokal, *genius loci* atau *spirit of place* dari tempat tersebut, melihat fenomena yang ada sebagai esensi dan landasan untuk dikembangkan dan juga sebagai kekuatan lokal.

“*the emblematic issue is authenticity and the notion that truly sustainable buildings need to more fully relate to the concept of locality and place*” (Guy dan Farmer, 2001, h. 144).

Dalam pendekatan *eco-cultural*, solusi-solusi yang digunakan menggunakan pertimbangan lokal, terkait dengan respon terhadap iklim, material lokal, identitas dari tempat tertentu, tradisi, cara hidup masyarakat lokal, dan dikaitkan dengan kesadaran akan masalah lingkungan.

#### *The Eco-social Logic – Buildings and the Community Place*

Dalam pendekatan *eco-social*, diyakini bahwa akar masalah dari *ecological crisis* yang ada berasal dari masalah sosial yang lebih luas. Hirarki dalam kehidupan sosial masyarakat yang menghasilkan kontrol pihak tertentu dan dominasi terhadap pihak lainnya berperan dalam penurunan lingkungan.

*“Environmental and ecological destruction is therefore best understood as a form of human domination, and the more hierarchical and oppressive the nature of a society, the more likely that it will abuse and dominate the environment”* (Guy dan Farmer, 2001, h. 145).

Pendekatan yang digunakan adalah dengan ‘menghilangkan’ hirarki yang dianggap sebagai akar masalah tersebut. Menggunakan eksistensi individu dan hubungannya dalam sebuah komunitas, dalam lingkup yang lebih kecil, dengan menghilangkan hirarki sehingga ada semacam ‘kesetaraan’ dalam kontrol terhadap lingkungannya sendiri.

*“The aim is the creation of healthy, self-reliant societies that exercise local control, take responsibility of their environment, operate a local economy based on minimal levels of material goods and the maximum use of human resources”* (Guy dan Farmer, 2001, h. 146).

Pendekatan *eco-social* terkait dengan partisipasi, *participatory design*, desain berbasis komunitas, dll.

## **2.6. Peran Praktisi dan Akademisi dalam Dunia Arsitektur dan Desain Lingkungan**

Dalam masalah lingkungan atau masalah permukiman, aktor selain pemegang kekuasaan dan masyarakat, adalah para tenaga ahli di bidang arsitektur dan desain lingkungan. Pihak-pihak seperti arsitek, konsultan, desainer, *planner*, praktisi, akademisi, atau bahkan pelajar dalam bidang arsitektur dan desain lingkungan. Aktor tersebut memiliki peran penting sebagai ‘tenaga ahli’ atau orang-orang yang ‘berkompeten’, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Mereka dapat berperan sebagai fasilitator dan pembuka wawasan bagi masyarakat melalui edukasi, pelatihan, atau diskusi. Berperan untuk mengidentifikasi masalah dan penyelesaiannya, *‘problem seeking and problem solving’*, melalui desain, rancangan, atau peraturan terkait lingkungan, atau bahkan melalui studi dan kritik.

Terdapat banyak karakter dan tipe dari aktor ini, tergantung dari ideologinya, atau kepada siapa 'service'-nya ditujukan. Dalam pendekatan *community-based development* tentunya *service* tersebut ditujukan kepada komunitas. Randolph T. Hester dalam artikelnya yang berjudul *Design Activism... For Whom?*, menjelaskan lima tipologi dari designer dilihat dari 'kepada siapa ia bekerja?', lima tipe tersebut adalah :

- *The Blissfully Naïve*, yang memiliki bakat secara spatial namun tidak memperdulikan konteks. *"They are so focused on form-making of objects that they are blind to the political impacts of their actions."*
- *The Savvy Naïve*, *"less talented spatially and more aware of connectedness"*. Mereka paham benar akan political impact namun mereka *'feign naivete'* atau berpura-pura tidak tahu apa-apa dan memilih untuk menjadi arsitek saja.
- *Servants*, kebanyakan desainer masuk ke tipe ini. Tugas mereka adalah *'serving clients'*. Apabila desain mereka dipertanyakan, mereka akan menjawab itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan klien (*as an excuse*).
- *Contextualists*, *"they take into account history, culture, and environment, especially at the site scale"*
- *Catalysts*, *'architectural agents of change'*, *"see design not only as a symbolic and utilitarian end but also a stimulus to bring about political transformations"*

Fokus *catalysts* bervariasi, yaitu *environmental justice*, *deep democracy*, *cultural and biological diversity*, dan *radical sustainability*.

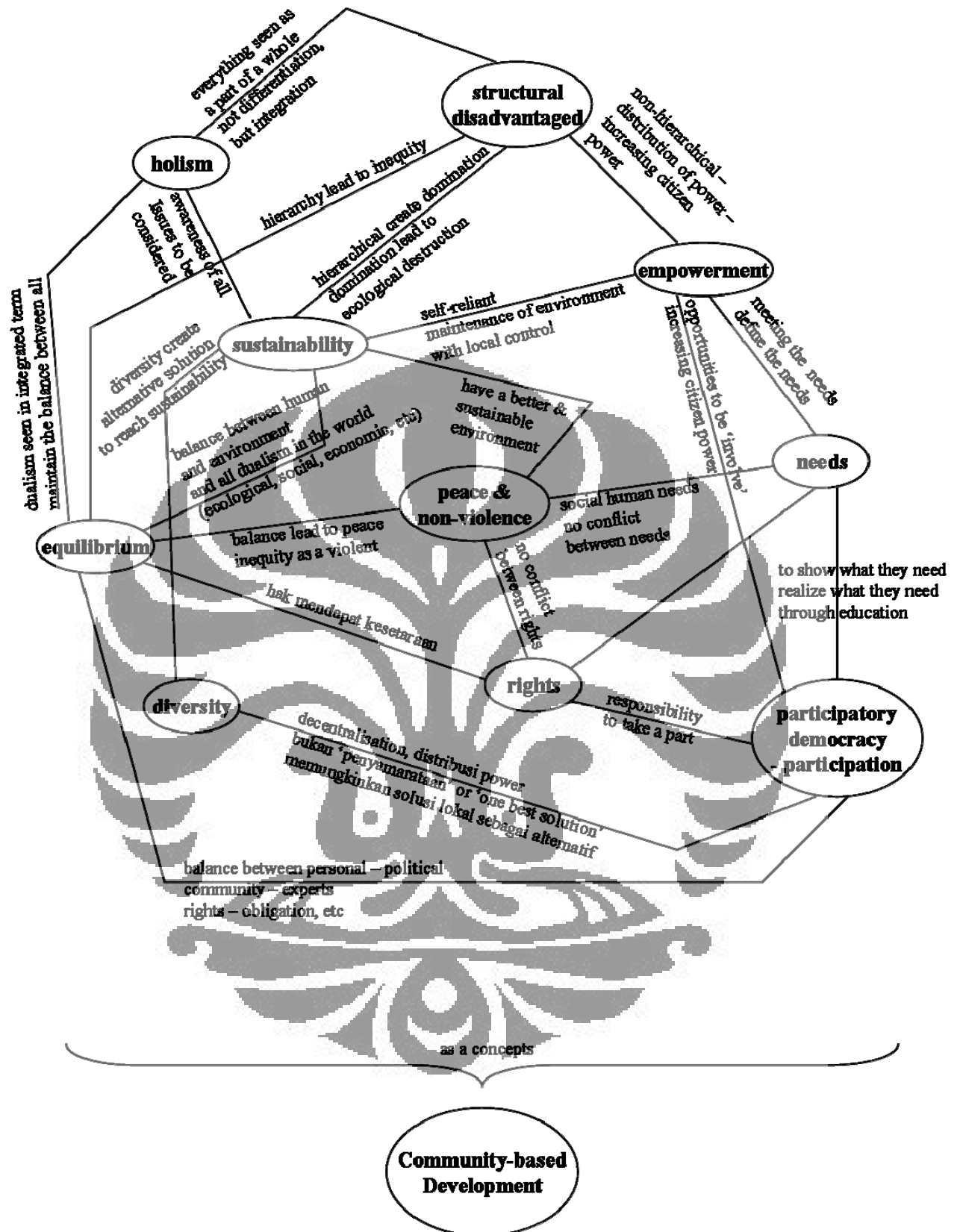
Tipe *catalysts* yang fokus terhadap *deep democracy* sangat sesuai dengan pendekatan yang berbasis komunitas. Tipe ini mengarah ke *participation*,

*empowerment of the less powerful*, dan *deep democracy*. Prinsip dan tujuannya serupa dengan *citizen participation* yang telah saya ungkapkan sebelumnya. Menurut Harrison Fraker Jr. dalam artikelnya *Design Activism*, pada *design activism* terdapat upaya yang lebih mendalam untuk mengubah paradigma yang ada saat ini, melihat sebuah isu secara kritikal, “*it uses a design to recognize a latent potential and make it visible*”. Solusi-solusi desain yang munculpun tidak seperti solusi yang biasa dilakukan dalam proyek partisipasi pada umumnya. (lihat *Berkeley Environmental Design FRAMEWORKS, issue: Design Activism, edition Spring 2005*)

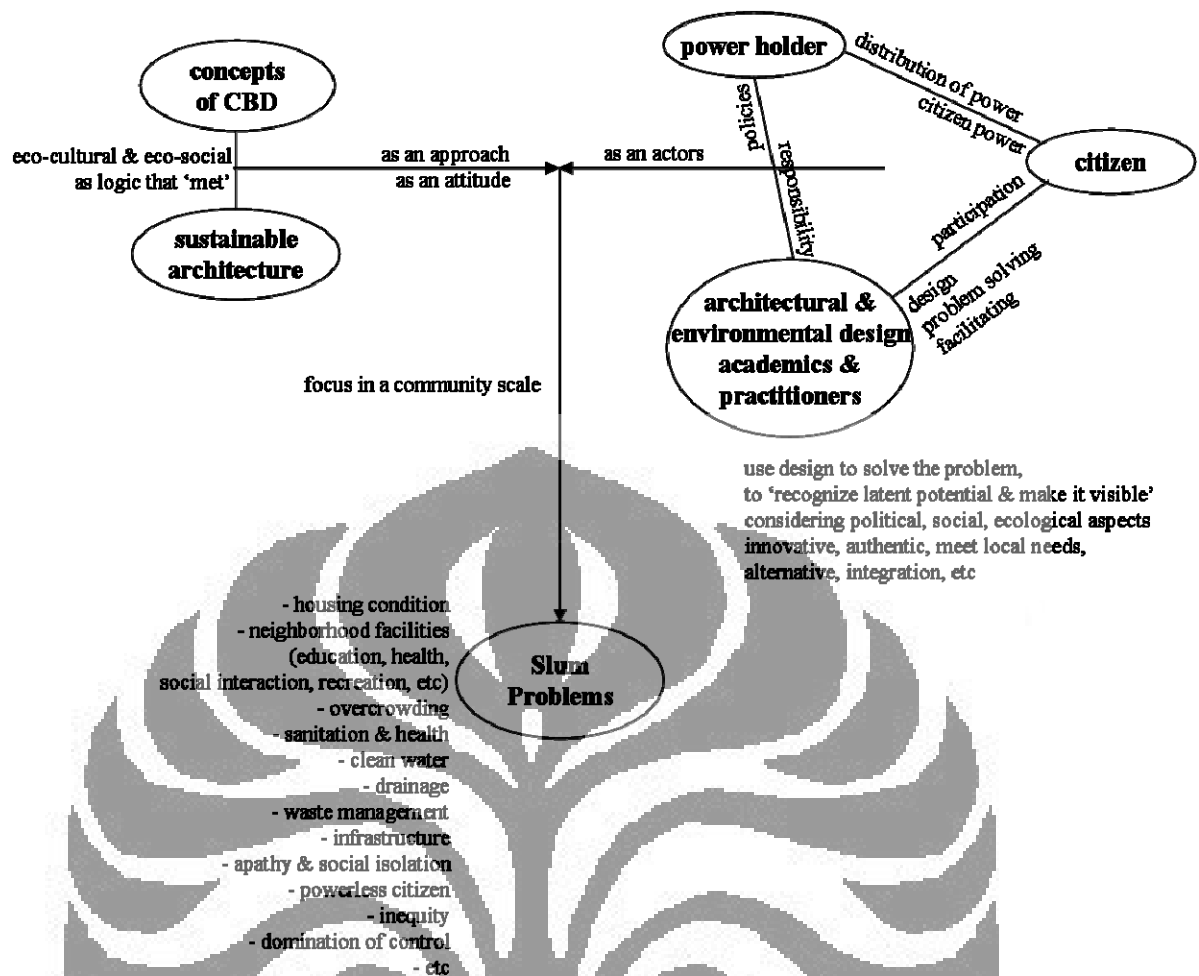
## 2.7. Interpretasi terhadap Teori

Interpretasi saya terhadap semua teori yang telah saya paparkan adalah saya melihat seluruh prinsip-prinsip tersebut seperti sebuah jaringan yang kompleks. Antara satu dengan yang lainnya saling terkoneksi. Tidak ada prinsip yang 'lebih tinggi' atau 'diatas' yang lain, tidak ada prinsip yang lebih dominan. Namun semuanya saling berhubungan dan juga memberi pengaruh satu sama lain. Kendati teori yang saya paparkan mengenai *community development* banyak mengarah ke ilmu sosial dan politik, namun prinsip-prinsip tersebut di-aplikasikan dalam pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah di permukiman kumuh dan tentunya dengan pertimbangan ekologis. Prinsip-prinsip tersebut menjadi sebuah wacana yang akan direalisasikan ke dalam sebuah pelaksanaan. Posisi arsitektur disini, terkait dengan penciptaan sebuah 'ruang', pemenuhan kebutuhan dari manusia yang akan memaknai ruang tersebut sebagai sebuah 'tempat', mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusinya, dengan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial masyarakat.

Saya mencoba merumuskan keseluruhan teori yang telah saya paparkan dalam sebuah peta konsep. Konsep yang coba mengkaitkan antara masalah yang ada di permukiman kumuh, dengan teori dan prinsip-prinsip dalam *community development* sebagai pendekatan yang digunakan.



Bagan 2.2  
Peta konsep *community-based development* (hasil interpretasi terhadap teori)



Bagan 2.3

Hubungan antara pendekatan, aktor, dan permasalahan (hasil interpretasi terhadap teori)

Rangkaian prinsip dari CBD tersebut, bertemu dengan *logic-logic* dari *sustainable architecture*, merupakan gagasan ideal sebagai sebuah wacana. Wacana yang akan direalisasikan ke dalam pelaksanaan. Untuk melaksanakan wacana tersebut, dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh, terdapat aktor-aktor yang terlibat. Para aktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pemegang kekuasaan mendistribusikan kekuasaannya kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam proses perancangan melalui partisipasinya. Para ahli dalam dunia arsitektur dan desain lingkungan melibatkan masyarakat dalam proses desain, dan sebagai profesional dalam dunia desain, tentunya juga bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan akan dampak dari solusi desain yang muncul.

## BAB 3

### STUDI KASUS : PERBAIKAN KAMPUNG TERPADU TUGU SELATAN

#### 3.1 Perbaikan Kampung Terpadu

Dalam usaha menyelesaikan masalah pemukiman kumuh di Jakarta, Pemda DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menata pemukiman kumuh. Yang dilakukan bukanlah dengan relokasi, tetapi perbaikan kampung dari berbagai aspek, tidak hanya fisik, tetapi juga sosial masyarakatnya. Pendekatan yang dilakukan adalah *Community Based Development*. Pendekatan tersebut dilakukan dengan memaksimalkan potensi masyarakat untuk memperbaiki kampungnya sendiri. Peran Pemda dan pihak lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator (pembimbing), baik dari segi dana maupun tenaga profesional.

Perbaikan kampung tersebut dikenal dengan istilah Perbaikan Kampung Terpadu MHT. MHT di prakarsai oleh Ali Sadikin pada tahun 1969. Dinamakan MHT karena untuk mengenang pahlawan Betawi, Muhammad Husni Thamrin. MHT merupakan sebuah proyek / gerakan perbaikan kampung di Provinsi DKI Jakarta. MHT telah bergerak sejak tahun 1969 dalam proyek pertamanya untuk mengatasi masalah pemukiman. Tahun 1985-1989 proyek MHT dilaksanakan di daerah aliran sungai (DAS), dan barulah pada tahun 1990-2000 mulai dilakukan penataan dan perbaikan pemukiman di 85 kelurahan di Jakarta secara terpadu dengan komponen Sosial, Ekonomi dan Fisik Lingkungan (Tri Bina). Akhirnya pada tahun 2006 mulai dilakukan uji coba, dengan istilah Perbaikan Kampung Terpadu. Sampai tahun 2009 telah resmi dijalankan sebagai Perbaikan Kampung Terpadu. MHT berhasil mendapat penghargaan yaitu *Aga Khan Award* pada tahun 1980 dan *Global Best Practice* dari *World Bank* pada tahun 2004.

Pada sub-bab di bawah ini, adalah data perbaikan kampung terpadu MHT. Data yang didapat merupakan data dokumentasi dari Dinas Perumahan DKI Jakarta

mengenai perbaikan kampung serta kuliah Rumah Swadaya, tentang perbaikan permukiman kumuh oleh Bapak Kusnindar dari Dinas Perumahan DKI Jakarta. Dokumentasi tersebut berupa foto-foto dan paparan mengenai program perbaikan kampung yang dilakukan, baik secara umum di DKI Jakarta, maupun paparan mengenai kawasan yang menjadi sasaran perbaikan kampung terpadu.

### 3.1.1. Maksud dan Tujuan Perbaikan Kampung Terpadu

Maksud dari proyek perbaikan kampung terpadu adalah meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pendekatan bertumpu komunitas, yang dilaksanakan secara komprehensif (Tri Daya), terpadu, dan berkesinambungan. Sehingga adanya saling interaksi antar aspek Tri Daya.

#### Tujuan

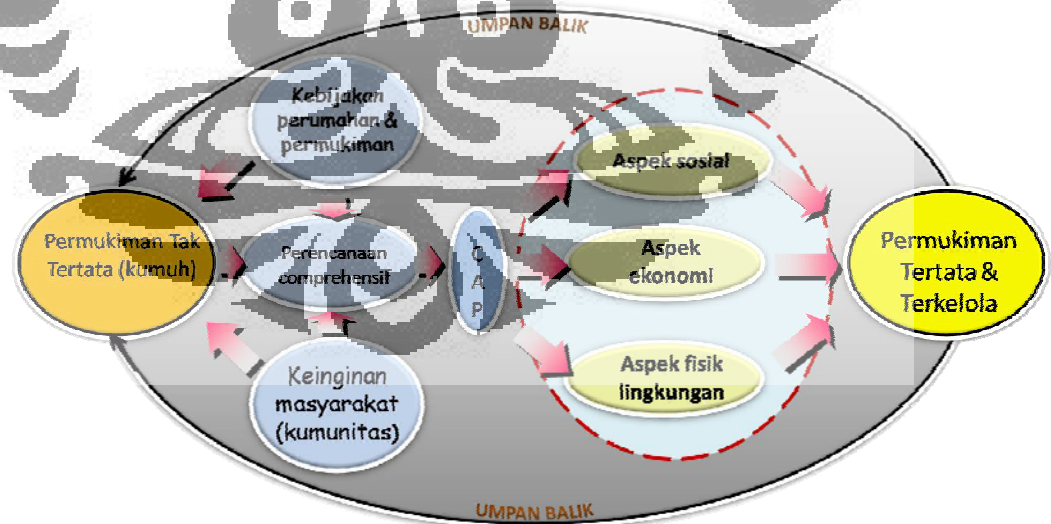
- Menata Lingkungan Kumuh menjadi lebih tertata dan terkelola dengan baik
- Terlibat aktifnya komunitas dalam setiap proses perbaikan kampung terpadu
- Berdaya dan mandiri lembaga lokal (Lembaga Sosial-Ekonomi, dan kelompok pengguna) dalam mengelola hasil pembangunan di lingkungannya
- Terwujudnya perbaikan kampung MHT terpadu meliputi 3 aspek/Tri Daya
- Terlibatnya para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perbaikan kampung
- Terlestarikannya fungsi-fungsi lingkungan



### 3.1..2. Pola Penanganan

Pola penanganan yang dilakukan dalam perbaikan kampung terpadu berawal dengan didasari dua aspek, yaitu Kebijakan Perumahan dan Permukiman serta keinginan masyarakat (Komunitas) pada permukiman yang tak tertata (kumuh). Kedua aspek tersebut akan dipertemukan dan saling disesuaikan melalui perencanaan yang komprehensif. Setelah melalui perencanaan tersebut, akan dibuat keluaran yaitu *Community Action Plan (CAP)*.

*Community Action Plan* disusun bersama komunitas setempat, yang hasilnya berupa master plan kampung yang komprehensif. CAP berupa hal-hal yang akan dilakukan bersama untuk perbaikan kampung dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan. Setelah CAP tersebut direalisasikan, diharapkan akan terbentuknya Permukiman yang tertata dan terkelola dan dapat menyelesaikan atau paling tidak memperbaiki masalah yang ada pada permukiman kumuh. Hasil dari perbaikan kampung tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan yang dapat dijadikan tipologi penataan permukiman kumuh lainnya di DKI Jakarta.



Gambar 3.1

Pola Penanganan Perbaikan Kampung Terpadu

(Sumber: Kuliah Rumah Swadaya oleh Pak Kusnindar dalam kelas Studi Perumahan Kota)

### 3.1.3. Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan perbaikan kampung adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Perbaikan Kampung, diselenggarakan dengan pilihan metoda Tri Daya yang diterapkan dalam seluruh proses dan tahap kegiatan pembangunan
- Pelaksanaan dilaksanakan secara bertahap :  
Pengorganisasian → Stabilisasi → Pelepasan
- Lokasi tidak menyeluruh di wilayah kelurahan, tetapi hanya pada kawasan kumuh yang memerlukan penataan, tetapi tetap memerhatikan keselarasan dengan lingkungan sekitarnya.



Gambar 3.2

Metode Pelaksanaan Perbaikan Kampung Terpadu

(Sumber: Kuliah Rumah Swadaya oleh Pak Kusnindar dalam kelas Studi Perumahan Kota)

### 3.1.4. Strategi Penanganan

Strategi yang dilakukan dalam penanganan perbaikan kampung tersebut adalah dengan mengalokasikan dana program sebagai stimulan bagi Penumbuhan dan Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Perumahan dan Permukiman. Alokasi dana dalam program ini didapat dari tiga sumber, yaitu :

- Dana Program dari APBD & APBN
- Swadaya Masyarakat (zakat, infaq dan iuran warga)
- Sumber lain dari Swasta

Pemangku kepentingan dalam perbaikan kampung ini adalah :

- Instansi Pemerintah Pusat
- Instansi Pemerintah Provinsi
- Swasta (CSR)
- NGO / LSM
- Perguruan Tinggi
- Asosiasi Profesi
- Komunitas Setempat

### 3.1.5. Sasaran Lokasi Perbaikan Kampung Terpadu

Lokasi perbaikan kampung terpadu dilakukan secara menyeluruh di DKI Jakarta. Perbaikan kampung dilakukan pada kelurahan-kelurahan yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh mulai dari kumuh berat sampai kumuh ringan. Sasaran lokasi mencakup kawasan yang diperuntukan untuk perumahan dan juga peruntukan lainnya sebagai satu kesatuan lingkungan. Sasaran lokasi juga disesuaikan dengan upaya pemecahan berbagai masalah permukiman yang legal dan ilegal.

Berikut adalah daftar kelurahan yang termasuk dalam program perbaikan kampung terpadu :

NO	Wilayah/Kelurahan	Jumlah RW	2006	2007	2008	Luas/HA
<b>1</b>	<b>Jakarta Pusat</b>					
1.	Kel. Tanah Tinggi	6 RW				11,4 Ha
2.	Kel. Kampung Rawa	7 RW				9,8 Ha
3.	Kel. Galur	4 RW				27,01 Ha
4.	Kel. Johar Baru	4 RW				6,3 Ha
		<b>21 RW</b>				<b>54,51 Ha</b>
<b>2</b>	<b>Jakarta Utara</b>					
1.	Kel. Tugu Selatan	5 RW				159 Ha
2.	Kel. Sunter Jaya	7 RW				23,79 Ha
3.	Kel. Papanggo	6 RW				125,63 Ha
4.	Kel. Pejagalan	6 RW				22,5 Ha
		<b>25 RW</b>				<b>330,92 Ha</b>
<b>3</b>	<b>Jakarta Barat</b>					
1.	Kel. Kamal	3 RW				52 Ha
2.	Kel. Kedaung Kali Angke	3 RW				77 Ha
3.	Kel. Semanan	3 RW				155 Ha
4.	Kel. Pekojan	4 RW				27,1 Ha
5.	Kel. Kapuk	3 RW				417,83 Ha
6.	Kel. Duri Kosambi	3 RW				123,16 Ha
7.	Kel. Tegai Alur	3 RW				184 Ha
		<b>22 RW</b>				<b>1036,1 Ha</b>
<b>4.</b>	<b>Jakarta Selatan</b>					
1.	Kel. Kuningan Barat	6 RW				81,63 Ha
2.	Kel. Menteng Dalam	8 RW				31,18 Ha
3.	Kel. Kebor Baru	7 RW				20,88 Ha
4.	Kel. Grogol Selatan	4 RW				285 Ha
5.	Kel. Pasar Manggis	6 RW				20,3 Ha
6.	Kel. Petukangan Utara	7 RW				299 Ha
		<b>38 RW</b>				<b>737,99 Ha</b>
<b>5.</b>	<b>Jakarta Timur</b>					
1.	Kel. Cakung Timur	13 RW				981,03 Ha
	<b>TOTAL JAKARTA</b>	<b>119 RW</b>				<b>3.141 Ha</b>

Tabel 3.1

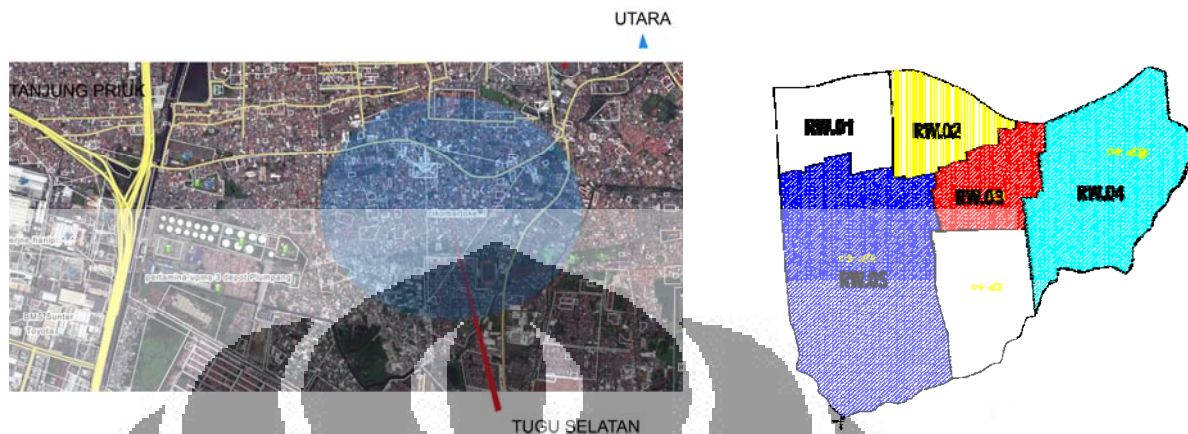
Sasaran Lokasi Perbaikan Kampung Terpadu

(Sumber: Kuliah Rumah Swadaya oleh Pak Kusnandar dalam kelas Studi Perumahan Kota)

Tugu Selatan merupakan salah satu kelurahan di Jakarta Utara yang menjadi sasaran perbaikan kampung terpadu.

## 3.2 Tugu Selatan

### 3.2.1. Latar Belakang Kawasan Tugu Selatan



Gambar 3.3

Peta Tugu Selatan dan Pembagian RW sasaran Perbaikan Kampung Terpadu

(Sumber: Pengolahan peta dari [www.wikimapia.org](http://www.wikimapia.org) & Slide Paparan Laporan Pendahuluan PKT Tugu Selatan 2007 )

Tugu Selatan merupakan salah satu kelurahan yang menjadi sasaran lokasi perbaikan kampung terpadu. Tugu Selatan berada di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Terdapat 5 RW yang termasuk dalam program perbaikan kampung. Yaitu RW 01, 02, 02, 03, 04, dan 05. Perbaikan kampung yang dilakukan di Tugu Selatan dimulai sejak tahun 2006. Pada tahun 2006 tersebut masih termasuk uji coba dalam Perbaikan Kampung Terpadu MHT. Namun program tersebut berjalan lancar dan akhirnya menjadikan nama Tugu Selatan sebagai kawasan percontohan dalam program perbaikan kampung untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh.

Tugu Selatan merupakan sebuah kawasan pemukiman yang cukup padat. Berada di wilayah Jakarta Utara sehingga memiliki kondisi udara yang cukup panas. Masyarakat di Tugu Selatan mayoritas merupakan pendatang namun yang telah bermukim lama (sejak tahun 1980-an) dan juga para pendatang baru yang menyewa hunian di kawasan ini. Tugu Selatan termasuk kategori kumuh sedang berdasarkan kriteria pemukiman kumuh. Kekumuhan kawasan Tugu Selatan lebih terlihat pada aspek fisik lingkungannya. Sedangkan tidak adanya masalah yang signifikan dalam

aspek sosial, dalam artian tidak ada masalah seperti kriminalitas atau masalah antar warga. Namun sikap apatis pada awalnya juga menjadi kendala dalam proses perbaikan kampung ini.

Masalah fisik lingkungan yang memasukkan Tugu Selatan sebagai kumuh sedang adalah sebagai berikut :

- Kondisi rumah yang tidak sehat
- Kondisi jalan yang tidak baik dengan ketinggian yang tidak teratur sehingga menyulitkan warga dengan kendaraan ataupun para pedagang bergerobak yang melewatinya
- Kondisi lingkungan yang tidak bersih (kotor)
- Kondisi udara di lingkungan yang panas dan kering (tidak adanya aspek "hijau")
- Pengelolaan sampah yang tidak baik

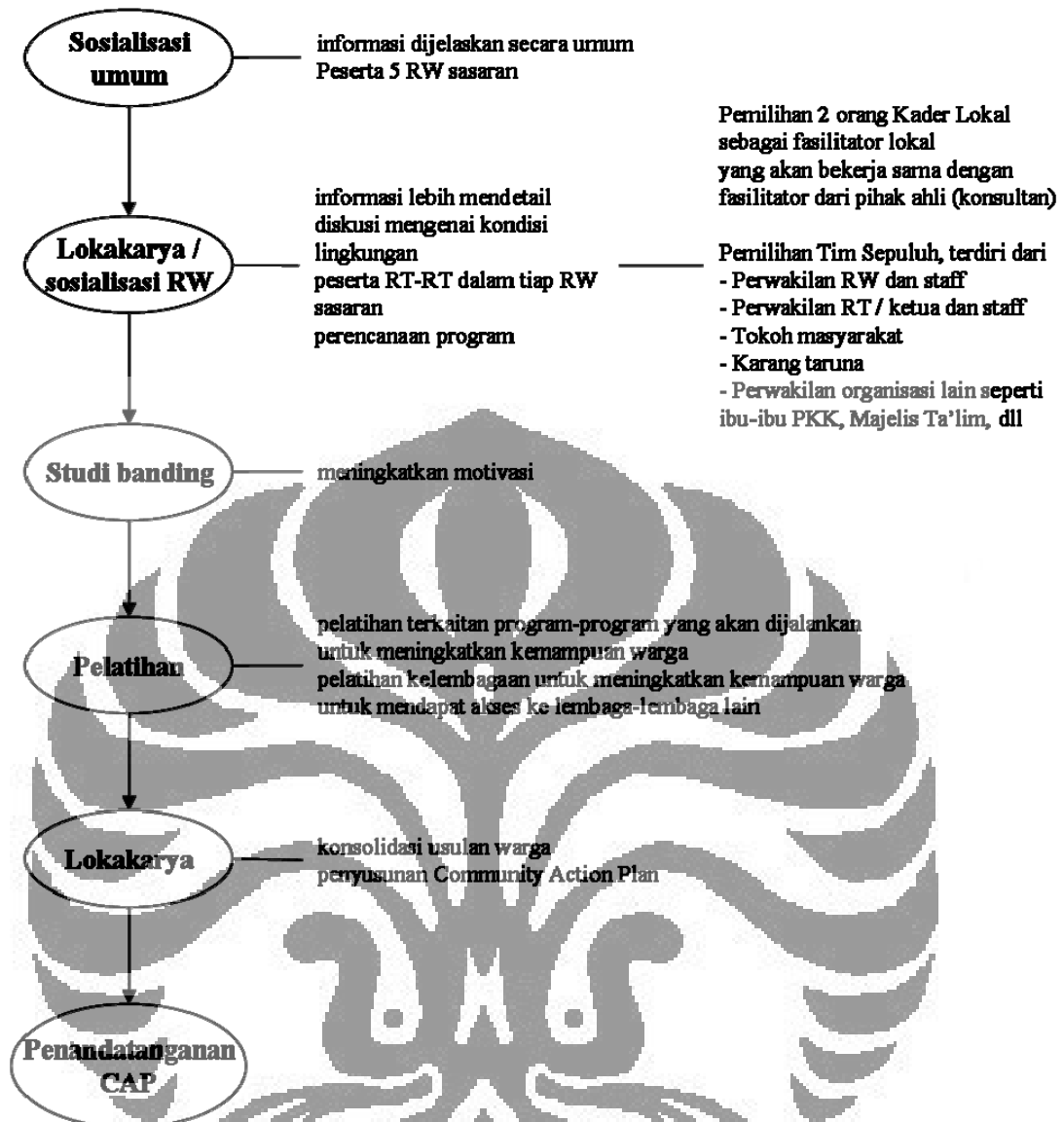
Tugu Selatan juga dikenal sebagai "Kampung Kambing". Hal tersebut karena banyak warga yang berternak kambing dengan cara dibiarkan bebas di perkampungan dan digembalakan.

### 3.2.2. Proses Perbaikan Kampung di Tugu Selatan

Pada awalnya, ketika pemerintah daerah dengan berbagai pihak yang membantu menjadikan Tugu Selatan sebagai sasaran lokasi perbaikan kampung dan mulai memperkenalkan program, terdapat kendala seperti sikap apatis dan ketidakpercayaan dari masyarakat setempat. Namun seiring dengan dijalankannya program, masyarakat mulai menerima dan mau berperan serta.

Hal yang pertama dilakukan adalah sosialisasi umum dalam tingkat kelurahan, menjelaskan bahwa akan diadakan perbaikan di kampung tersebut. Lalu lebih diperkecil lagi lingkungannya yaitu Lokakarya atau sosialisasi dalam tingkat RW. Dalam musyawarah tingkat RW ini, para pihak yang menjadi pembimbing / fasilitator, mulai menjelaskan bagaimana kondisi sebuah pemukiman yang baik dan sehat berdasarkan standar umum yang ada. Kemudian dipilih perwakilan dari RW yaitu dua orang kader lokal sebagai fasilitator lokal dan sepuluh orang dari warga sebagai perwakilan dari tiap RW yang disebut Tim Sepuluh. Kemudian perwakilan warga tersebut diajak melakukan studi banding ke kawasan tertata untuk memberi motivasi untuk melakukan hal yang serupa pada kawasannya. Hal tersebut berhasil menumbuhkan motivasi warga untuk bergerak memperbaiki lingkungan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kusnindar, salah satu pihak yang sangat berperan dari Pemda DKI Jakarta, *"Semua berawal dari mimpi, masyarakat diajak untuk bermimpi apa yang mereka inginkan dalam lingkungan permukiman mereka"*. Hal tersebut memulai diskusi antara masyarakat dan pembimbing dalam proses bimbingan. Sehingga muncul ide-ide dari komunitas setempat untuk memperbaiki kampung mereka.

Proses berikutnya adalah perencanaan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Tidak hanya para profesional, namun juga bersama-sama dengan warga setempat. Hal yang telah didapat dari keinginan masyarakat (komunitas) disesuaikan dengan kebijakan perumahan dan permukiman yang ada, begitu juga sebaliknya. Sehingga dari hasil perencanaan bersama tersebut, dapat disusun Community Action Plan (CAP) yang menjadi landasan apa saja yang akan dilakukan dalam perbaikan kampung.



Bagan 3.2

Proses Perencanaan Perbaikan Kampung Terpadu

(hasil kajian dokumentasi dan wawancara)

Setelah CAP dibuat dan ditandatangani oleh warga dan pemangku kepentingan lainnya. Barulah proses perbaikan kampung dilaksanakan dengan didampingi oleh fasilitator. Pendampingan dilakukan tidak sepanjang perbaikan, namun kurang lebih 3 bulan, setelah itu dilepaskan ke warga dan fasilitator lokal. Kemudian warga yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan serta memberi inisiatif untuk kampungnya sendiri.



### 3.2.3. Program Perbaikan Kampung Terpadu Tugu Selatan

Terdapat berbagai program yang dilakukan di Tugu Selatan, tidak hanya perbaikan aspek fisik lingkungan, tetapi juga pembenahan dan pelatihan dari sisi sosial serta memaksimalkan potensi komunitas dalam aspek ekonomi. Program-program yang dilakukan di Tugu Selatan adalah :

- Perbaikan Rumah Swadaya dan Maesonet (Rumah Sehat)

Dalam program perbaikan rumah swadaya, dana yang digunakan dapat berupa dana bantuan dari pihak swasta, dana bantuan awal dari pemerintah, serta swadaya masyarakat dari infaq dan hasil dana bergulir dari koperasi warga. Maesonet digunakan sebagai rumah sewa dan penghuninya secara bergulir menyewa maesonet tersebut.



Gambar 3.4

Perbaikan Rumah Bergulir di Tugu Selatan

(Sumber: Kuliah Rumah Swadaya oleh Pak Kusnindar dalam kelas Studi Perumahan Kota)



Gambar 3.5  
Maesonet Type 36

(Sumber: Kuliah Rumah Swadaya oleh Pak Kusnandar dalam kelas Studi Perumahan Kota)

#### - Koperasi Perumahan

Koperasi digunakan sebagai sarana bagi warga menerima pinjaman / bantuan untuk memperbaiki rumah dan perguliran dana warga. Selain itu koperasi juga dijadikan sarana untuk melatih kelembagaan warga sehingga warga dapat meneruskan pengelolaan lingkungannya sendiri secara profesional dan dapat memiliki kemampuan kelembagaan dalam hubungannya dengan pihak profesional seperti pemerintah, LSM, dan pihak lain.



Gambar 3.6

Pelatihan Kelembagaan Koperasi

(Sumber: Lampiran Foto PKT Tugu Selatan)

- Perbaikan Jalan Lingkungan

Kondisi jalan kurang baik, rusak atau memiliki ketinggian yang tidak merata. Sehingga diadakan perbaikan fisik lingkungan yaitu perbaikan jalan.



Gambar 3.7

Perbaikan Jalan Lingkungan (kondisi tahun 2005-kiri dan tahun 2008-kanan)  
(Sumber: Dokumentasi foto hasil Uji Coba Perbaikan Kampung Terpadu Tugu Selatan)

- Penghijauan Lingkungan

Program penghijauan merupakan program yang paling terasa perubahannya. Kawasan Tugu Selatan yang panas dan kering lambat laun menjadi kawasan yang sejuk dan "hijau".



Gambar 3.8

Penghijauan Lingkungan (kondisi tahun 2005-kiri dan tahun 2008-kanan)  
(Sumber: Dokumentasi foto hasil Uji Coba Perbaikan Kampung Terpadu Tugu Selatan)

### - Septictank Komunal

Septictank komunal bagi warga yang belum memiliki septictank sendiri. Septictank diberikan sumbangan, namun untuk perawatan kedepannya dari swadaya masyarakat yang menggunakan septictank tersebut.



Gambar 3.9

Salah satu Septictank Komunal di Tugu Selatan

(Sumber: Kuliah Rumah Swadaya oleh Pak Kusnindar dalam kelas Studi Perumahan Kota)

### - Daur Ulang Sampah (Komposting)

Untuk mengatasi masalah pengolahan sampah, terdapat program composting. Sampah-sampah dari lingkungan di olah untuk dijadikan kompos. Program composting sangat berguna tidak hanya untuk mengolah sampah, namun juga hasilnya dapat digunakan untuk mendukung program penghijauan di kawasan tersebut.



Gambar 3.10

Proses Daur Ulang Sampah untuk Komposting

(Sumber: Kuliah Rumah Swadaya oleh Pak Kusnindar dalam kelas Studi Perumahan Kota)

**Universitas Indonesia**

## BAB 4

### ANALISIS KASUS

#### 4.1 Penghijauan Lingkungan : Kampung Kambing menjadi Kampung Kembang

Judul diatas merupakan sebuah perubahan identitas yang didapatkan warga Tugu Selatan sebagai hasil dari perbaikan kampung mereka. Kampung yang dulu terkenal dengan kambing yang digembalakan dan dibiarkan berkeliaran di kampung, karena itu merupakan salah satu pekerjaan warga di kampung tersebut. Namun kini kambing-kambing tersebut sudah tidak berkeliaran lagi. Kampungpun kini menjadi hijau asri dipenuhi tanaman yang tumbuh segar. Sehingga kampung tersebut kini dijuluki "Kampung Kembang". Identitas tersebut juga menjadi salah satu kebanggaan warga sekitar. Membawa mereka menjadi kampung percontohan yang telah membuktikan keberhasilannya dalam usaha memperbaiki kampung mereka menjadi lebih baik.

Fokus saya dalam studi kasus perbaikan kampung di Tugu Selatan adalah dengan menganalisis penghijauan sebagai salah satu program. Studi melalui proses perbaikan yang terdokumentasi sejak tahun 2006, serta melihat keadaan saat ini pada tahun 2010. Studi terhadap penghijauan juga dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam *community-based development*. Studi yang saya lakukan saya fokuskan ke RW. 02 sebagai RW yang dianggap paling berhasil dalam program perbaikan kampung ini. Saya melakukan pengamatan dengan survey langsung, serta wawancara para warga baik dari pihak pengurus maupun warga lainnya.

Dalam pelaksanaan program penghijauan, sebelumnya terdapat studi banding ke wilayah-wilayah yang dianggap berhasil dalam program penghijauan. Studi banding yang dilakukan warga RW.02 / Tim Sepuluh dan didampingi dengan fasilitator lokal dan fasilitator konsultan adalah ke wilayah kampung Banjar Sari, Cilandak dan ke Mekar Sari. Studi banding dilakukan tidak hanya untuk

meningkatkan motivasi warga untuk dapat melakukan hal serupa di lingkungannya sendiri. Namun juga warga diberi pengetahuan yang berkaitan dengan penghijauan dan lingkungan, seperti cara menanam dan merawat tanaman, cara komposting dan pemilahan sampah terkait komposting dan terkait kebersihan lingkungan (sampah organik dan non-organik), dll. Studi banding dan pelatihan tersebut dijalankan oleh perwakilan warga yaitu Tim Sepuluh dan fasilitator lokal. Tentunya banyak keterbatasan untuk mengajak 'seluruh' warga dalam proses tersebut. Kemudian para perwakilan ini akan 'menransfer' pengetahuan yang ia dapatkan kepada warga di lingkungannya.

Dalam praktek penghijauannya, awalnya warga diberi bantuan sekian ratus pohon sebagai motivasi. Jumlah pohon yang diberikan berbeda-beda dalam pengembangan program setiap tahunnya (300 pohon, 450 pohon, dll). Selanjutnya warga dapat beinisiatif sendiri atau swadaya untuk menambah, merawat dan mengembangkan tanaman di lingkungan mereka. Pohon-pohon yang pertama diberikan dibagikan ke warga untuk dirawat. Namun tidak semua warga mau merawat tanaman tersebut. Sehingga para perwakilan berinisiatif 'memberi contoh' dengan melakukan penghijauan di satu jalan yang disebut 'jalan unggulan'. Inisiatif tersebut bertujuan agar warga dapat melihat manfaat atau sisi positif dari penghijauan sehingga diharapkan warga dapat melakukan hal yang sama. Mulanya warga protes karena 'mengapa hanya jalan itu yang di'hijau'kan', namun kemudian hal tersebut menjadi motivasi warga untuk melakukan hal yang sama. Karena warga telah melihat langsung bagaimana manfaat penghijauan tersebut dari sisi kesehatan, estetika, dll. Sehingga lambat laun 'hijau' di lingkungan RW.02 tersebut mulai menyebar dan menjadi seperti sekarang.



Gambar 4.1  
Kondisi RW. 02 Tugu Selatan tahun 2005 (dokumentasi konsultan)

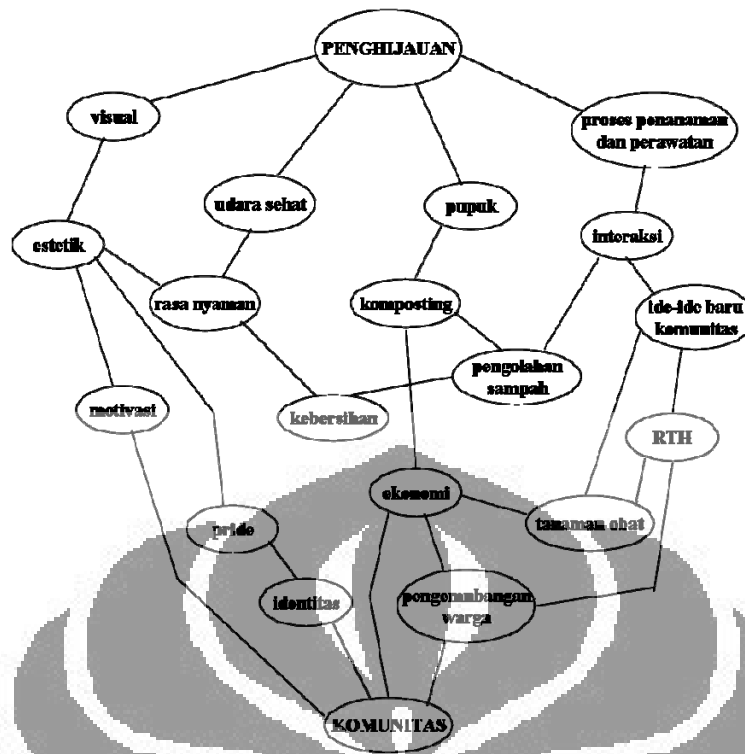


Gambar 4.2  
Kondisi RW. 02 Tugu Selatan tahun 2010 (dokumentasi pribadi)

Gambar diatas menunjukkan perubahan kawasan di RW.02 setelah melalui penghijauan dan program-program lain seperti perbaikan jalan, rumah, dll. Selama proses penghijauan di RW.02, muncul ide-ide baru masyarakat diluar kegiatan menanam dan merawat. Seperti inisiatif membuat tempat duduk di jalan, penanaman tanaman obat, pembuatan saung sebagai tempat interaksi, diskusi, melatih anak jalanan, dll. Semakin berkembangnya pengetahuan warga, harapan mereka semakin bertambah, sebelumnya usaha untuk membuat lingkungannya bersih dari sampah, kemudian untuk memperindah dan mempersehat lingkungannya, lalu usaha seperti komposting, kemudian interaksi dan pengembangan warga.



Gambar 4.3  
Tempat duduk di jalan, saung bersama, dan tanaman obat sebagai bentuk inisiatif warga



Bagan 4.1  
Peta konsep manfaat penghijauan di Tugu Selatan (skema pribadi atas hasil pengamatan)

Dalam program penghijauan di RW.02 Tugu Selatan, terdapat banyak manfaat yang didapat oleh warga. Tidak hanya kawasan yang menjadi lebih bersih, sejuk, 'hijau' dan indah, tetapi ada hal-hal terkait penghijauan seperti program komposting yang mengarah ke masalah sampah dan masalah ekonomi. Dengan penghijauan maka warga membutuhkan pupuk, lalu ada komposting yang membutuhkan sampah, mengarah ke pengolahan sampah, kemudian kompospun dapat dijual kembali. Selain itu penghijauan tersebut membentuk identitas baru dan kebanggaan bagi warga. Selama prosesnya juga memunculkan interaksi antar warga yang akhirnya mengarah ke ide-ide baru untuk mengembangkan komunitasnya.

Dalam hal ini, solusi fisik yang dilakukan, yaitu penghijauan, tidak hanya berpengaruh pada kualitas fisik lingkungan saja. Tetapi juga dapat meningkatkan kualitas sosial komunitasnya, seperti interaksi antar warga, pembentukan identitas, kebanggaan, dll. Namun apakah manfaat tersebut dirasakan oleh semua anggota komunitas? Bagaimana pelaksanaan penghijauan tersebut sebagai salah satu solusi sebagai realisasi wacana *community-based development*?



## 4.2. Analisis Penghijauan

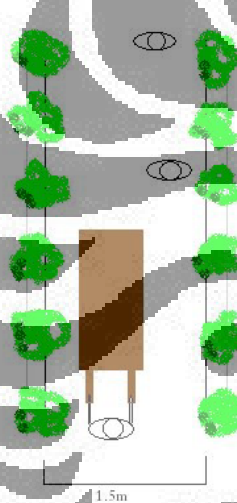
Terlepas dari keberhasilan yang diindikasikan dengan "hijau"-nya kawasan Tugu Selatan saat ini, saya mencoba mengkritisi program penghijauan tersebut. Manfaat dari penghijauan tentunya tidak diragukan lagi. Namun bagaimana proses penghijauan tersebut, prakteknya baik dalam konteks 'menanam dan merawat' serta dalam kaitannya dengan implementasi prinsip-prinsip *community-based development*. Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses penghijauan, dan keseluruhan proses perbaikan kampung di Tugu Selatan. Semua manfaat, keindahan, rasa nyaman, atau kebanggaan tersebut, siapa yang merasakannya? Apakah seluruh warga dalam komunitas? Atau pihak-pihak tertentu? Selain itu berdasarkan pengamatan saya, dalam pelaksanaan penghijauan tersebut terdapat konflik yang timbul, baik secara sosial dalam komunitas maupun dalam pelaksanaan penghijauan sebagai solusi untuk memperbaiki kampung.

### 4.2.1. Konflik Intervensi Jalan

Secara fisik lingkungan, kondisi permukiman yang padat membuat area untuk ruang terbuka hijau sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Oleh karena itu jalan yang ada menjadi sangat potensial untuk dijadikan area penghijauan. Tanaman memenuhi sepanjang jalan di Tugu Selatan, baik pot-pot di pinggir jalan dengan rak bambu, tanaman di dinding, di pagar, atau di gantung. Namun ada konflik dari penggunaan jalan sebagai area "menanam" tersebut. Pengguna motor atau pedagang dengan gerobak merasa terganggu dan merasa jalan tersebut menjadi lebih sempit. Bahkan salah satu warga mengatakan bahwa ada oknum yang sampai memecahkan pot atau menabraknya karena merasa terganggu. Hal lain yang terjadi adalah anak-anak yang bermain di jalan kadang merusak tanaman, memetik atau membuang sampah di pot. Dari konflik tersebut tentunya perlu dianalisis kembali proses penghijauan yang dilakukan di sepanjang jalan tersebut.



Gambar 4.4  
Kondisi jalan di RW. 02 Tugu Selatan (dokumentasi pribadi)



Gambar 4.5  
Ilustrasi kondisi jalan  
(hasil pengamatan)

Jalan merupakan sarana komunal yang menjadi area sirkulasi, baik pejalan kaki, pengguna motor ataupun pedagang dengan gerobak. Selain itu dalam konteks pemukiman padat, jalan juga digunakan sebagai area bermain anak-anak. Fungsi jalan tersebut tentunya tidak boleh terlupakan dan harus menjadi pertimbangan dalam proses penghijauan di sepanjang jalan. Sehingga manfaat dari penghijauan tetap dapat dipetik tanpa harus menimbulkan konflik dari pengguna jalan yang lain.

Kondisi jalan yang sempit di RW.02, dengan mayoritas antara 1.5 m, 2 m, atau 3-5 m di beberapa jalan yang agak lebar di RW.02. Dengan pengendara motor, atau gerobak para pedagang. Selama pengamatan dan wawancara warga, terdapat keluhan seperti :

*"iya mbak jalan sempit dikasi kembang, ada-ada aja"*

*"itu kembang kalo malem suka ditendang-tendangin itu, suka ketabrak-tabrak juga sama motor apa gerobak"*

*"ntar kalo ditabrak yang nabrak diomelin"*

*"pernah ada pot yang dibanting nggak tau sama siapa"*

*"anak-anak kadang juga kalo main suka buang sampah di pot"*

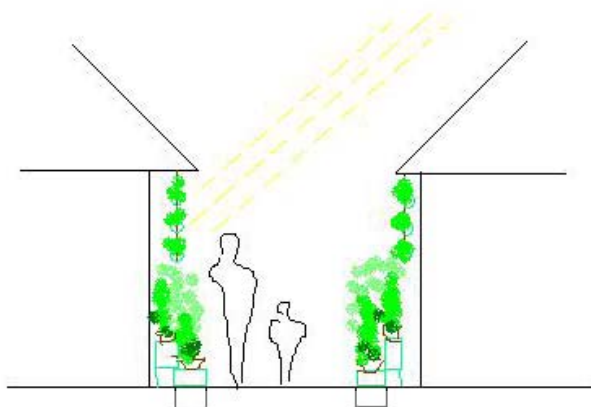
*"dijalan gede juga pernah itu jatuh ke got potnya"*

Pernyataan-pernyataan tersebut mengindikasikan adanya konflik dalam proses penghijauan tersebut. Konflik secara fisik dalam artian praktek penghijauan tersebut kurang mempertimbangkan fungsi jalan sebagai sarana komunal, sebagai area sirkulasi bagi pejalan kaki, pengendara motor ataupun gerobak pedagang. Selain itu konflik sosial dalam artian ada pihak yang merasa 'terganggu' atau 'kesal'. Hal ini tentunya menjadi konflik yang bertentangan dengan prinsip dari CBD itu sendiri. Prinsip mengenai hak masyarakat dalam penggunaan jalan lingkungannya, dan konflik tersebut dapat mengarah ke masalah sosial lainnya seperti 'gap' dalam komunitas, dan hal tersebut bukanlah hal yang baik dalam keberlanjutan sosial komunitas.

#### 4.2.2. Penghijauan vs Pencehayaan



Gambar 4.6  
Kondisi beberapa rumah di Tugu Selatan (dokumentasi pribadi)



Gambar 4.7  
Ilustrasi pencahayaan (hasil pengamatan)

Di beberapa titik, tanaman yang ditanam sampai memenuhi fasad rumah. Tanaman secara horizontal dan vertikal menutupi fasad rumah. Hal tersebut dapat mengurangi besarnya cahaya yang masuk ke dalam rumah.

Tentunya cahaya dibutuhkan tidak hanya untuk memberi penerangan atau pencahayaan, tetapi juga menjaga udara di dalam rumah menjadi lebih sehat. Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman kepada warga mengenai aspek lingkungan yang lain, misalnya kesehatan bangunan. Sehingga dalam proses penghijauan ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti pencahayaan matahari atau mengenai udara yang dibutuhkan di dalam rumah, agar penghijauan yang dilakukan tidak hanya "menghijaukan se hijau mungkin" tetapi juga bersamaan dengan aspek lingkungan yang baik lainnya.

#### 4.2.3. Drainase

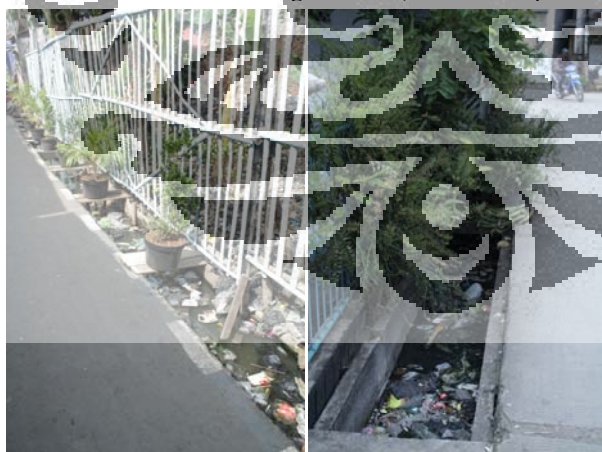
Penghijauan yang dilakukan disepanjang jalan yang kebanyakan jalan yang sempit, membuat lahan untuk menanam sangat terbatas. Sehingga warga berinisiatif untuk membuat rak-rak dari bambu untuk meletakkan tanaman mereka. Rak-rak bambu tersebut berada diatas saluran air (got). Namun dari hasil yang saya lihat, masih banyak, bahkan mayoritas saluran-saluran yang airnya tidak mengalir. Saluran tersebut juga seringkali terdapat sampah. Sehingga warga akan terus menerus membersihkan sampah-sampah tersebut. Namun masalah saluran air tersebut seolah "tertutupi" dengan rimbunnya tanaman yang ada diatasnya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tidak hanya mengenai

penghijauan. Tidak hanya mengenai bagaimana menanam dan merawat tanaman agar lingkungan menjadi hijau dan asri. Tetapi konsep lingkungan yang baik juga harus ditanamkan kepada warga. Aspek-aspek lain seperti drainase atau masalah resapan air hujan juga dipertimbangkan bersamaan dengan aspek penghijauan. Mungkin akan ada ide-ide inovatif lain yang tidak hanya "menghijaukan" tetapi juga menyelesaikan masalah resapan air hujan, pencegahan banjir serta membuat saluran air lebih lancar.

Ketika saya berbincang dengan warga sekitar, mereka memang merasa masalah saluran air yang mampat tersebut juga sulit diselesaikan. Namun mereka juga mengatakan bahwa di Jakarta Utara dengan dataran yang rendah memang sulit, berbeda dengan Jakarta Selatan yang lebih tinggi. *"Kalau di Jakarta Utara, airnya hitam tanpa sampah juga udah mending, nggak harus ngalir"*. Seperti ada batasan kepuasan akan apa yang telah dicapai. Bukankah terus maju mengarah ke ideal itu lebih baik?

Selain itu ada juga warga yang mengatakan, *"nanem kembang tapi got masih banyak sampah, saya mah mendingan bersihin sampah mbak"*

Gambar 4.8  
Kondisi saluran air di RW. 02 Tugu Selatan (dokumentasi pribadi)



Hal tersebut mengidentifikasi bahwa dalam proses penghijauan ini masih kurang terintegrasi dengan masalah saluran air dan sampah yang ada di saluran air tersebut. Hal ini tentunya menjadi kendala yang tidak mudah, terkait dengan kesadaran

masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran air dan terkait dengan penyediaan tempat sampah di lingkungan tersebut.

*"kalau ada walikota mau dateng, pada de naro tempat sampah tiap sepuluh meter, abis gitu diberesin lagi"*

#### 4.2.4. Pemerataan Penghijauan

Gambar 4.9  
Konsentrasi penghijauan di RW. 02 Tugu Selatan  
(hasil pengamatan)



Pada pengamatan saya di lingkungan Tugu Selatan, terutama RW.02, tidak 'seluruh' kawasan dapat dikatakan hijau. Tentunya terdapat keterbatasan dalam pengamatan saya tersebut, saya melihatnya secara 'umum' saat yang mengelilingi wilayah RW.02, bukan dengan pengamatan detail seperti intensitas titik hijau di seluruh kawasan.

Ketika saya mengelilingi wilayah 'dalam', suasananya sangat hijau, rimbun dan sejuk, namun semakin 'keluar' ketika saya berjalan di

lingkar luar RW.02, kondisinya sangat berbeda, hanya rumah-rumah tertentu saja yang 'hijau', kondisi keseluruhan seolah belum mengalami penghijauan.

Adanya indikasi kurangnya pemerataan dalam proses penghijauan tersebut. Hal ini dapat terkait dengan kemampuan warga secara ekonomi untuk membeli tanaman, atau kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan yang belum terbentuk, melihat hal lain lebih penting dari 'sekedarnya penghijauan' bagi mereka. Atau memang sejak awal proses dari program penghijauan ini tidak merata dan kurang 'merangkul' seluruh warga dalam komunitas tersebut.

*"beli kembang banyak gitu kan mahal ya mbak, mubazir, mendingan uangnya buat orang miskin"*

*"waktu pohon-pohonnya datang tu kan diturunin di alfa situ tu, dibagiinnya ya ke dia-dia juga"*

### 4.3. Analisis Partisipasi

Proses awal yang dilakukan berupa sosialisasi mengenai perbaikan kampung terpadu yang akan dilakukan di Tugu Selatan. Keadaan masyarakat yang sama sekali tidak mengerti perancangan, dengan *background* pendidikan yang tidak tinggi, tentunya akan sangat buram terhadap apa yang disampaikan. Sedangkan sosialisasi menjelaskan tentang rencana-rencana yang ada, lalu berdiskusi, masyarakat menerima, ok, bergerak. Dalam waktu singkat (kurang lebih 3 bulan), masyarakat menjalankan mulai dari sosialisasi, lokakarya, studi banding, lalu pembuatan dan penandatanganan CAP.

#### 4.3.1. Partisipasi vs Mobilisasi

Partisipasi tidak sebatas masyarakat "ikut serta" dalam perancangan dan kegiatan perbaikan. Tidak sebatas pada bergerak atau tidaknya masyarakat dalam program-program tersebut, baik pikiran, tenaga, dan uang. Namun proyek partisipasi juga merupakan sebuah usaha untuk membangkitkan inisiatif dan keberanian dari masyarakat. Aspek lain dalam *Community-based Delevopment* seperti *empowerment*. Usaha dalam membuat masyarakat, terutama masyarakat dengan kondisi seperti di permukiman kumuh, untuk meningkatkan *power* / kekuatan mereka. Kekuatan untuk memilih, mengungkapkan ide-ide mereka, bahkan kemampuan untuk mengenal apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Pondasi dari konsep *Community Development* ini yang menurut saya terlewatkan disini. Masyarakat belum "diperkuat" dulu, baik dari segi pemahaman akan CBD, partisipasi, dan juga pelaksanaannya. Jangan sampai partisipasi yang ada menjadi seperti "mobilisasi", masyarakat digerakkan, memang untuk hal yang baik bagi mereka, namun masyarakat kurang memahami esensi dari apa yang mereka lakukan. Keluaran solusi yang terjadipun menjadi sempit, tidak ada ide-ide baru yang muncul dari masyarakat. Tidak ada inovasi akan solusi yang lebih otentik dan kontekstual di tiap permukiman kumuh dengan masalah-masalahnya sendiri yang tentunya bisa saja berbeda-beda. Program-program yang menjadi keluaran dari semua proses tersebutpun menjadi tipikal, penghijauan, septictank komunal,

komposting, rumah sehat, sumur resapan, dll. Program tersebut rata-rata tipikal di beberapa penataan permukiman kumuh yang dilakukan di berbagai tempat di Jakarta. Program-program tersebut memanglah solusi yang baik dan dibutuhkan sebagai *basic needs* dari permasalahan permukiman. Namun bagaimana dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, dari sisi sosial, edukasi, pembuktian eksistensi diri di masyarakat yang lebih luas? Penyelesaian masalah permukiman kumuh tidak sebatas penataan fisik yang berkelanjutan, tetapi juga penyelesaian akan budaya kekumuhan, budaya kemiskinan, akan *way of life* masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan tentunya berkelanjutan.

Saya menjadi mempertanyakan, apakah itu partisipasi yang sesungguhnya? Atau memang pada kenyataannya hal tersebutlah yang terjadi di lapangan? Dan yang saya sebutkan tadi hanyalah sebuah wacana yang memiliki kesulitan dan keterbatasan untuk direalisasikan pada masalah yang dihadapi secara langsung?

#### 4.3.1. Siapakah yang menjadi Partisipan?

Dalam menjalankan proyek perbaikan kampung, dibutuhkan adanya penghubung antara warga dengan pihak profesional sebagai pembimbing. Oleh karena itu dibentuklah kader-kader yang akan mewakili masyarakat dalam kemitraan dengan tenaga ahli seperti pemerintah, konsultan, LSM, dll. Tentunya diadakan pelatihan-pelatihan kelembagaan agar mereka memiliki kemampuan berorganisasi dan kemitraan. Sehingga diharapkan kedepannya mereka akan terus bergerak secara mandiri untuk mengembangkan kampungnya. Seperti di Tugu Selatan, dibentuk Tim Sepuluh yang terdiri dari pengurus RW, RT, PKK, Tokoh Masyarakat, organisasi lain, atau orang yang dianggap berkompeten. Tim Sepuluh tersebutlah yang akan diberi pelatihan, baik kelembagaan, maupun pelatihan yang berkaitan dengan program-program seperti penghijauan, komposting, dll. Pengetahuan inilah yang akan diteruskan ke masyarakat.



Mereka jugalah yang akan menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Para kader disini dianggap sebagai 'perwakilan' dari warga, sebagai orang-orang yang dapat 'merepresentasikan' kebutuhan dari warga dan apa masalah yang ada dalam komunitas. Namun siapa 'perwakilan' tersebut? Apakah benar-benar dapat mewakili apa yang dibutuhkan oleh komunitas secara keseluruhan? Bagaimana latar belakang mereka dan bagaimana interaksi mereka dengan anggota komunitas secara keseluruhan?

Saat saya berbincang dengan warga, ada kata-kata seperti

*"orangnya ya dia-dia aja",*

*"ya mereka kan orang mampu ya mbak, ya kita segen kaya nggak enak gitu"*

Istilah '*dia-dia aja*' disini mengindikasikan adanya semacam '*gap*' dalam komunitas, 'mereka' yang dimaksud adalah orang-orang yang terlibat aktif dalam program tersebut, orang-orang seperti pengurus RT, RW atau organisasi lain, yang dalam hal ini, menjadi 'perwakilan' dalam perbaikan kampung di Tugu Selatan.

Hal tersebut menunjukkan adanya jarak dan ketidaksetaraan di dalam lingkup komunitas itu sendiri. Bahkan beberapa warga yang saya wawancara mengatakan '*nggak pernah denger*' atau '*nggak pernah diajak*' ketika saya menanyakan '*pak disini ada perbaikan kampung ya pak?*'. Padahal orang-orang yang saya wawancarai merupakan warga yang cukup lama tinggal di kampung tersebut (sejak tahun 1980-an). Program perbaikan kampung inipun dilakukan sejak tahun 2006. Idealnya, apabila program tersebut bertumpu pada masyarakat, setidaknya masyarakat mengetahui akan keberadaan program tersebut.

Saya menjadi mempertanyakan, siapakah partisipan disini? Ketika saya mewawancarai para pengurus, para 'kader' atau 'perwakilan' warga, mereka sangat mengenal program ini secara mendetail. Mereka menceritakan pengalamannya, kebanggaannya, manfaatnya, dll. Namun ketika saya mewawancarai ibu rumah tangga yang sedang menggondong anaknya, bapak pengusaha bengkel, ibu penjaga warung, anak-anak muda yang sedang 'nongkrong', tukang becak, kakek yang sedang santai di depan rumah, atau bahkan anak kecil yang sedang bermain, saya tidak mendapatkan hal yang sama. Bahkan mayoritas mereka tidak mengetahui akan hal itu.

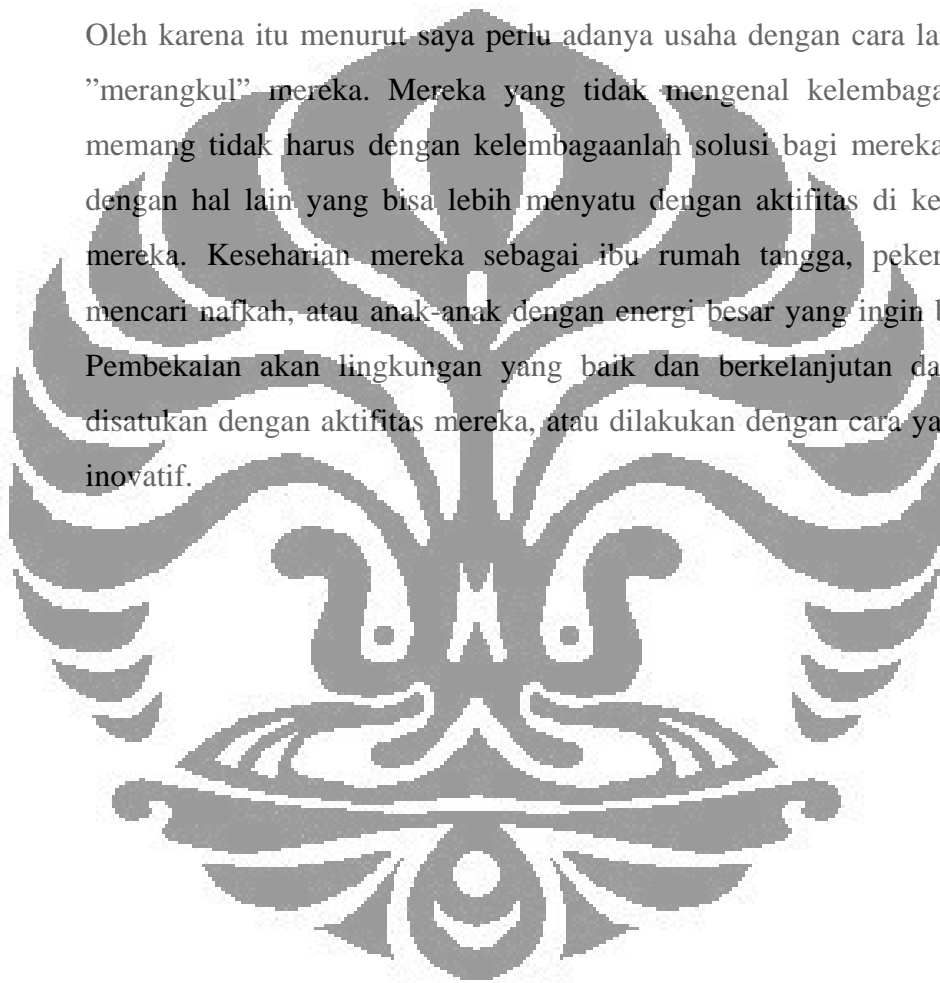
Wawancara yang saya lakukan memang tidak bisa dibilang menyeluruh dan dapat merepresentasikan masalah yang ada. Namun hal tersebut tentunya dapat menjadi sebuah indikasi yang mengarah ke masalah tersebut. Pihak-pihak yang saya wawancarai (selain dari para 'kader'), bervariasi mulai dari anak-anak usia 10-12 tahun, pemuda laki-laki dan perempuan usia 20an, bapak-bapak usia 40an, ibu-ibu usia 40-50an, kakek usia 80an, dengan profesi yang bermacam-macam juga, mulai dari pelajar, tukang bengkel, tukang becak, pengusaha warung, sampai pengangguran.

Menurut analisis saya, secara umum para kader-kader tersebut pada dasarnya memanglah orang yang lebih peduli, sehingga tidak sulit untuk mengajak mereka untuk bermitra. Latar belakang mereka yang juga terlibat dengan organisasi seperti kepengurusan RW atau PKK, tentunya membuat mereka tidak begitu asing akan kelembagaan. Selain itu latar belakang ekonomi mereka yang mengarah ke 'adanya waktu bagi mereka untuk terlibat'. Namun bagaimana dengan para ibu-ibu rumah tangga, para pekerja di sektor informal yang lebih memikirkan pemenuhan kebutuhan di rumah daripada "sekedar" bermusyawarah atau berurusan dengan kelembagaan. *"mereka si kaya ya mbak sempet aja gitu-gitu"*.

Bagaimana dengan anak-anak sebagai penerus, sebagai pihak yang sangat kritis dalam pemenuhan edukasi, sebagai pihak yang tumbuh, bermain dan belajar di kampung tersebut. Pihak-pihak diluar kader-kader tersebut inilah

yang biasanya sulit untuk berpartisipasi dan lebih apatis. Karena memang mereka lebih mendahulukan apa yang mereka anggap menjadi kebutuhan dan tanggung jawab utama mereka. Sehingga mereka seolah tidak peduli akan hal-hal lain yang dirasa merepotkan atau membuang-buang waktu. Padahal pihak-pihak inilah yang memiliki komposisi lebih besar dalam sebuah komunitas. Baik dalam segi jumlah, serta porsi waktu mereka berada dan beraktifitas di kampung tersebut.

Oleh karena itu menurut saya perlu adanya usaha dengan cara lain untuk "merangkul" mereka. Mereka yang tidak mengenal kelembagaan, dan memang tidak harus dengan kelembagaanlah solusi bagi mereka. Tetapi dengan hal lain yang bisa lebih menyatu dengan aktifitas di keseharian mereka. Keseharian mereka sebagai ibu rumah tangga, pekerja yang mencari nafkah, atau anak-anak dengan energi besar yang ingin bermain. Pembekalan akan lingkungan yang baik dan berkelanjutan dapat saja disatukan dengan aktifitas mereka, atau dilakukan dengan cara yang lebih inovatif.



## BAB 5

### DISKUSI : JURANG ANTARA WACANA DAN PELAKSANAAN

Berdasarkan analisis pada Bab 4, poin-poin yang saya kritik terkait dengan penghijauan sebagai salah satu solusi yang digunakan dalam pelaksanaan perbaikan kampung di Tugu Selatan, adalah sebagai berikut :

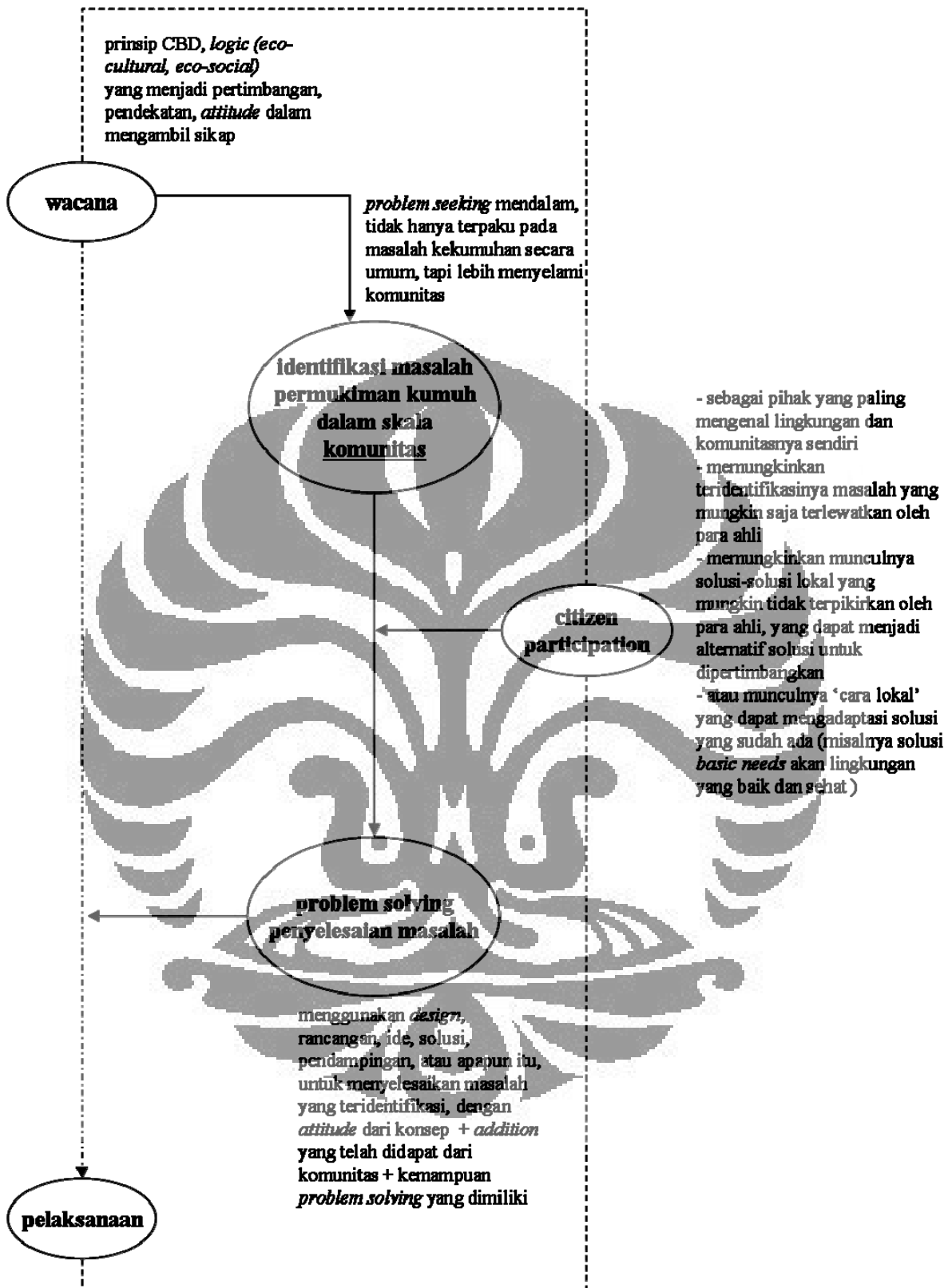
- Pada pelaksanaannya terdapat konflik yang membenturkan kebutuhan-kebutuhan dalam komunitas sendiri. Yaitu kebutuhan akan fungsi ruang dimana penghijauan itu dilakukan (intervensi jalan), serta kebutuhan akan aspek lingkungan lain yang perlu dipertimbangkan dalam perbaikan kampung (kesehatan bangunan, drainase, masalah sampah, dll).
- Solusi belum dilakukan secara merata atau menyeluruh dikarenakan berbagai kendala seperti kendala kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan, kemampuan ekonomi masyarakat, dan bahkan karena dalam pelaksanaannya prinsip partisipasi itu belum secara menyeluruh dilakukan, sehingga yang merasakan manfaatnya pun tidak seluruh anggota komunitas. Kendala tersebut yang perlu dikaji lebih dalam untuk dicari solusinya.
- Partisipasi yang terbatas pada Bergeraknya masyarakat untuk menjalankan program, namun tidak bersamaan dengan upaya edukasi masyarakat secara mendalam untuk dapat menemukan masalah di lingkungannya, apa yang mereka butuhkan, dan akhirnya mengarahkan mereka untuk mencari alternatif-alternatif solusinya.
- Partisipasi yang terbatas pada 'para perwakilan', yang ternyata belum tentu dapat mewakili kebutuhan anggota komunitas secara luas, adanya hirarki antara 'perwakilan' dengan anggota komunitas yang mengarah ke *gap* dan kesenjangan di dalam tubuh komunitas sendiri. Bahkan tidak seluruh

anggota komunitas mengetahui adanya program perbaikan kampung yang dilakukan di kampung mereka.

- *Problem seeking* yang kurang mendalam dalam lingkup komunitas, sehingga terdapat masalah dalam komunitas yang terlewatkan, penyelesaian yang munculpun dapat dikatakan tipikal dan merupakan solusi terhadap masalah yang umum dan *basic*, akhirnya dampak lokal yang mungkin timbul tidak terantisipasi (contohnya konflik yang terjadi di penghijauan).

Apabila melihat kriteria permukiman kumuh di DKI, terdapat sepuluh indikator yang menjadi pertimbangan, seperti ventilasi bangunan, pembuangan limbah, drainase, pemakaian air bersih, dll. Namun solusi yang muncul tidak menyelesaikan masalah yang terdapat pada indikator permukiman kumuh tersebut. Penghijauan merupakan salah satu bentuk solusi yang dilakukan terhadap masalah permukiman kumuh. Penghijauan sebagai bentuk pelaksanaan dari keseluruhan konsep yang ada. Lalu bagaimana kaitannya antara masalah-masalah yang saya identifikasi tersebut dengan idealisme dari konsep yang ada sebagai sebuah wacana? Mengapa *gap* atau jurang antara wacana dan pelaksanaan akan *Community-based Development* terlihat disini?

Oleh karena itu saya mengkaitkan teori sebagai konsep atau gagasan ideal dengan kenyataan yang terjadi sebagai pelaksanaan dari konsep tersebut. Melihat hubungan peran komunitas dengan partisipasinya dan para ahli dengan kemampuannya. Perlu saya jelaskan lagi disini, para ahli yang saya maksud adalah para praktisi dan akademisi, seperti arsitek, planner, konsultan, desainer, dan pihak lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian masalah lingkungan secara umum, dan permukiman kumuh secara khusus.



Bagan 5.1  
Proses perealisasiian wacana ke dalam pelaksanaan (hasil analisis)

Wacana yang ada menjadi landasan pertimbangan, pendekatan, *attitude* dalam mengambil sikap. Dipertemukan dengan kondisi yang ada di lapangan (dalam hal ini permukiman kumuh), mengidentifikasi masalah yang ada di komunitas. Dalam *problem seeking* ini, komunitas di eksplor secara mendalam dan mendasar, tidak hanya terpaku pada masalah kekumuhan secara umum tetapi menyelami komunitas tersebut. Walaupun masalah permukiman kumuh memiliki pola masalah yang umum, namun tetap saja kemungkinan akan masalah yang lebih kontekstual perlu dipertimbangkan. Itulah mengapa komunitas itu yang dijadikan tumpuan, karena ruang lingkungannya yang lebih kecil memungkinkan masalah yang mendasar teridentifikasi dan akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan potensi komunitas yang mendasar pula.

Kemudian untuk mengarah ke *problem solving* dari masalah yang telah teridentifikasi, masuklah peran komunitas disini, dalam bentuk *citizen participation*. Para ahli yang telah saya sebutkan tadi, tentunya telah melakukan pengamatan dahulu sebelum ia menentukan '*lokasi ini perlu diperbaiki*'. Telah ada *mind set* akan masalah yang ada di lokasi itu dan solusi apa yang perlu dilakukan. Posisi *citizen participation* disini sebagai pelengkap, mengutip pernyataan Fagence (1977) yang telah saya sebutkan sebelumnya di Bab 1, "*participation is an addition to, not a substitute for, professional planning*". Karena memang para ahli atau para profesional yang bertanggung jawab dalam praktek perancangan tersebut. Peran komunitas disini, sebagai pihak yang paling mengenal lingkungannya, memungkinkan teridentifikasinya masalah yang mungkin saja terlewatkan oleh para ahli. Memungkinkan munculnya solusi-solusi lokal yang mungkin saja tak terpikirkan oleh para ahli, yang dapat memperkaya alternatif-alternatif solusi dalam perbaikan kampung. Kemungkinan lain adalah munculnya 'cara lokal' sebagai bentuk adaptasi dari solusi-solusi yang telah ada di *mind set* para ahli sebelumnya. *Citizen participation* disini tidak hanya dibutuhkan setelah keputusan diambil yaitu untuk menjalankan solusi atau program-programnya, tetapi justru menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Kemudian dalam *problem solving*, untuk menyelesaikan masalah yang telah teridentifikasi, yaitu dengan rangkaian konsep yang menjadi landasan, ditambah dengan *addition* dari komunitas, dan tentunya dengan kemampuan para ahli dalam menyelesaikan masalah melalui rancangan, desain atau program-programnya. Barulah hasil dari keseluruhan rangkaian itu menjadi bentuk pelaksanaan dalam pendekatan *community-based development* untuk menyelesaikan masalah kekumuhan.

Terkait dengan tujuan mencapai lingkungan permukiman yang berkelanjutan, dalam bagan di atas saya menghubungkan antara wacana – *citizen participation* dan *citizen participation* – pelaksanaan. Sesuai dengan *eco-cultural* dan *eco-social logic* dalam *sustainable architecture* sebagai sebuah wacana, pertimbangan lokal untuk mencari solusi sangat dipentingkan. Selain itu hirarki sosial yang dianggap sebagai akar dari masalah lingkungan dapat terhapus melalui partisipasi ini. Komunitas juga merupakan pihak yang akan menjalankan fungsi-fungsi lingkungannya. Oleh karena itu, pelaksanaan *citizen participation* yang sebenarnya merupakan aspek kritical disini.

Lalu mengapa jurang pemisah antara wacana dan pelaksanaan itu ada?

Dari sebuah wacana menuju pelaksanaan, tidak secara langsung dilakukan. Tetapi melewati proses yang tergambar di bagan di atas. Asumsi saya, apabila ada yang terlewatkan dari proses tersebut, maka akan menimbulkan celah, dan apabila semakin banyak yang terlewatkan, celah tersebut akan semakin melebar. Seperti misalnya dalam identifikasi masalah, apabila kurang mendalam, tentunya akan ada masalah yang terlewatkan dan mengarah ke solusi yang kurang efektif pula. Atau dalam partisipasi komunitas, apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan konsep partisipasi itu sendiri, tentunya tujuannya tidak akan tercapai.

Terkait dengan peran praktisi dan akademisi dalam dunia Arsitektur dan Desain Lingkungan, saya mencoba mengambil beberapa contoh pendekatan yang menurut saya lebih mendalam dan kritis dalam melihat sebuah masalah dan mencari solusinya. Seperti misalnya workshop yang dilakukan *Education Care Unit* kepada anak-anak dengan pendekatan edukasi dan kreatif, dengan tujuan



menumbuhkan kepekaan anak-anak terhadap lingkungannya, memahami permasalahan lingkungan secara sederhana dan mencoba mencari solusinya. Workshop dilakukan dengan suasana yang menyenangkan, seolah menyatukan dua bagian dari *everyday life* anak-anak yang paling dominan, yaitu bermain dan belajar. (lihat [www.lingkunganku.com](http://www.lingkunganku.com)). Pendekatan lain seperti penggunaan teknik *phenomenological* dalam *participatory design*, dimana *phenomenology* memungkinkan kita memahami akan masalah yang mendasar, esensi, titik nol dari sebuah fenomena, sehingga solusi yang muncul akan mengena ke permasalahan tersebut. Pendekatan seperti membuat proyeksi akan kemungkinan yang terjadi beberapa tahun ke depan, dan memasukkannya ke dalam pertimbangan untuk membuat solusi pada saat ini. Atau melihat *daily-time use* dalam *everyday life* dan fenomena yang terjadi di dalamnya, sehingga pengidentifikasian masalah dapat lebih mendalam dan tak ada masalah yang terlewatkan. (lihat *Berkeley Environmental Design FRAMEWORKS, issue: Design Activism, edition Spring 2005, h. 5, dan 10-12*). Cara lain seperti mencari solusi dengan menggunakan potensi yang ada di komunitas. Seperti yang dilakukan pada pembuatan *Play-Pump* di Afrika Selatan. Yaitu menggunakan energi anak-anak saat bermain komidi putar untuk dihubungkan dengan pompa air. Solusi yang inovatif dan sederhana tersebut sebagai respon terhadap masalah penyediaan air bagi komunitas dan masalah energi. (lihat *Design Like You Give a Damn, Architectural Responses to Humanitarian Crises, 2006, h. 282-283*)

Pendekatan tersebut hanyalah sedikit contoh dari sekian banyak alternatif pendekatan yang dapat diusahakan dengan perspektif yang lebih kritis dan mendalam. Dengan memperdalam identifikasi masalah, lalu pendekatan yang mendalam untuk mencari solusi dan dampak yang mungkin terjadi dari solusi tersebut, ditambah dengan *addition* dari komunitas yang dapat dijadikan potensi, “*uses design to recognize latent potential and make it visible*”, maka menurut saya jurang antara wacana dan pelaksanaan dalam *community-based development* sebagai pendekatan permasalahan permukiman kumuh dapat terjembatani.

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Terdapat jurang antara wacana yang melandasi dengan kenyataan pelaksanaan *Community-based Development*. Pelaksanaan dalam komunitas masih menunjukkan adanya jarak antara para pengurus organisasi sebagai kader dalam komunitas dengan komunitas secara keseluruhan. Terdapat intervensi pihak tertentu sehingga tidak semua kepentingan dalam komunitas terpenuhi. Pengidentifikasian masalah yang kurang mendalam dalam konteks komunitas, partisipasi dengan pemahaman konsep dan partisipan yang terbatas / tidak menyeluruh, alternatif solusi yang masih sempit, belum merata, bahkan menimbulkan beberapa konflik, merupakan celah-celah yang mengawali adanya jurang tersebut.

Pertanyaan lanjut dari tulisan ini adalah, apakah pemahaman akan konsep CBD atau partisipasi itu sendiri yang menjadi penyebab ketidaksesuaian yang terjadi? Ataukah pelaksanaan tersebut merupakan sebuah adaptasi dari kendala-kendala seperti kurangnya waktu, dana dan desakan untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh? Pertanyaan tersebut masih belum dapat saya jawab, namun apabila itu yang terjadi, tentunya itu tidak dapat dibenarkan. Bagaimana kita dapat merealisasikan sebuah konsep kalau kita tidak benar-benar memahami konsep tersebut? Dan kendala yang ada tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan sebuah wacana sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Karena hal yang akan terjadi adalah sasaran yang tidak tercapai, tidak membawa sebuah perubahan akan lingkungan dan kualitas hidup yang lebih baik, dan wacana itu hanyalah akan menjadi sebuah wacana, mengarah ke sebuah pengelabuan apabila kita mengakui wacana itulah yang benar-benar dilaksanakan.

Merealisasikan sebuah wacana ke dalam pelaksanaan memang bukanlah hal yang mudah. Dalam kasus permukiman kumuh, masalah di dalamnya merupakan masalah yang kompleks, tentu masih membutuhkan studi mendalam, dengan rentang waktu yang lama untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Namun tetap perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkecil celah antara wacana dan pelaksanaan, untuk sedekat mungkin sesuai dengan gagasan ideal yang melandasinya.

## 6.2. Saran

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini studi kasus yang saya ambil hanyalah satu komunitas dan tentunya hasil dari studi saya tidak dapat digeneralisasi sebagai masalah yang terjadi di permukiman kumuh lainnya. Saya menyarankan, perlu ada kajian lebih lanjut melalui studi dengan kondisi komunitas dan permasalahannya yang lebih beragam. Perlu digali kembali mengenai pendekatan-pendekatan yang dapat dikembangkan untuk memperkaya alternatif mengenai cara masyarakat untuk berpartisipasi, alternatif akan solusi yang lebih 'mengena', inovatif, dan sesuai dengan konteks komunitas. Skripsi saya ini dapat dijadikan gagasan awal untuk melanjutkan kajian yang lebih mendalam dengan studi kasus yang lebih beragam pula. Kajian yang dapat memberikan kontribusi dalam usaha penyelesaian masalah permukiman kumuh.

Akhir kata, saya berharap skripsi saya dapat bermanfaat dalam dunia Arsitektur dan Desain Lingkungan, sebagai gagasan dalam upaya menjembatani wacana dan pelaksanaan sebuah konsep, tidak hanya konsep *Community-based Development* dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh, tetapi juga berbagai konsep lainnya yang dijadikan landasan untuk membentuk lingkungan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup manusia didalamnya.

## DAFTAR REFERENSI

- Architecture for Humanity. (2006). *Design Like You Give a Damn*. New York: Metropolis Books.
- Clinard, Marshall B. (1966). *Slum and Community Development: Experiments in Self-help*. New York: The Free Press.
- Fagence, Michael. (1977). *Citizen Participation in Planning*. Oxford: Pergamon Press.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives – vision, analysis and practice*. Australia: Longman
- Fraker Jr., Harrison. (2005). Design Activism. *Berkeley Environmental Design FRAMEWORKS Issue: Design Activism*. 3-7.
- Guy, Simon, & Farmer, Graham. (2001). Reinterpreting Sustainable Architecture: The Place of Technology. *Journal of Architectural Education*. 140-148.
- Hester, Randolph T. (2005). Design Activism For Whom?. *Berkeley Environmental Design FRAMEWORKS Issue: Design Activism*. 8-15
- 
- Arnstein, Sherry R. (1969, July). *A Ladder of Citizen Participation*. JAIP, Vol. 35, No.4. 216-224. Oktober 2010. <<http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html>>

Oxford University Press. (2010). *Oxford Dictionaries*. November 2010.

<[http://oxforddictionaries.com/view/entry/m\\_en\\_gb0782920#m\\_en\\_gb0782920](http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0782920#m_en_gb0782920)>

Oxford University Press. (2010). *Oxford Dictionaries*. November 2010.

<[http://oxforddictionaries.com/view/entry/m\\_en\\_gb0228600#m\\_en\\_gb0228600](http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0228600#m_en_gb0228600)>

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. November 2010.

<<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>>

<<http://lingkunganku.com/category/materi-belajar-lingkungan>>

<<http://lingkunganku.com>>

Kusnindar. Maret 2010. *Rumah Swadaya di DKI Jakarta, Studi Kasus: Perbaikan Kampung*. (Kuliah dosen tamu dalam Kelas Studi Perumahan Kota)

Paparan Perbaikan Kampung Terpadu Muhammad Husni Thamrin. 2007. (*Format Power Point*)